



**KPKNL**  
KISARAN



LAPORAN  
KINERJA  
2022

Melayani dengan “C”





**KPKNL**  
KISARAN

**“CINTA”**  
**Cepat, Inovatif, Normatif, Transparan, Adaptif**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2022, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan kinerja KPKNL Kisaran atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah diberikan kepada KPKNL Kisaran selama tahun 2022.



Laporan Kinerja disusun sebagai implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 dilakukan berdasarkan hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan kontrak kinerja KPKNL Kisaran. Berdasarkan data IKU Kemenkeu Three pada KPKNL Kisaran Tahun 2022, Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Kisaran adalah sebesar 115,25 % dari 11 Sasaran Strategis (SS) dengan total 20 IKU.

Berbagai pencapaian kinerja tahun 2022, tidak terlepas dari penguatan dan peningkatan sumber daya, dukungan peningkatan kompetensi, sistem informasi manajemen yang terintegrasi serta sinergi yang terjalin dengan baik dengan seluruh pihak-pihak terkait. Kami senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerja dan memberikan layanan kepada seluruh stakeholder dengan melakukan perbaikan secara terus menerus dan motto layanan CINTA (Cepat, Inovatif, Normatif, Transparan dan Adaptif).

Laporan Kinerja Tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas mandat dan capaian kinerja yang telah ditetapkan, serta menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan umpan balik bagi langkah perbaikan di masa mendatang dan mendorong kami untuk berupaya meningkatkan kinerja KPKNL Kisanan.

Kisanan, Januari 2023  
Kepala Kantor



*Agus Budianta*  
Agus Budianta

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), perlu diterapkan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang terdiri dari prinsip/asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Berdasarkan evaluasi kinerja Tahun 2022 terhadap Kontrak Kinerja KPKNL Kisaran yang terdiri dari 11 Sasaran Strategis (SS) dan 20 IKU, sebanyak 10 IKU berstatus hijau (memenuhi ekspektasi) dan 1 IKU berstatus kuning (tidak memenuhi ekspektasi) dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 115,25%. Pencapaian target dan realisasi IKU tahun 2022 secara ringkas diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100,00%	136,32%	136,32%
	Persentase produktivitas lelang	36,00%	46,26%	128,49%
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase realisasi pokok lelang	100,00%	107,01%	107,01%
	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDP s.d 2017)	100,00%	1070,25%	1070,25%
Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4,82	4,92	102,07%
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65,00%	73,43%	112,96%
	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100,00%	109,06%	109,06%
	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100,00%	160,00%	160,00%
	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN	100,00%	140,00%	140,00%

	(portofolio aset)			
Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	19,00%	0,00%	200,00%
Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92,00%	100,00%	108,70%
	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	10,00%	0,02%	199,85%
Edukasi yang efektif	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	91,00	94,14	103,45%
Pengawasan dan pengendalian yang efektif	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85,00%	96,55%	113,59%
SDM yang kompeten	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	75,00%	120,00%	160,00%
Organisasi yang <i>fit for purpose</i>	Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK	75,00	92,72	123,63%
	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80,00	99,20	124,00%
	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90,00	99,95	111,06%
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,50%	94,19%	98,63%
	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100,00%	185,00%	120,00%

Penjabaran terkait Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama KPKNL Kisaran akan tergambar pada setiap bab dalam Laporan Kinerja ini.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Umum

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai salah satu unit di lingkungan Kementerian Keuangan mempunyai peran strategis dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang. Peran dan tugas yang diamanahkan kepada DJKN tersebut dilaksanakan secara *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

Kantor Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran sebagai salah satu instansi vertikal yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara juga bertanggungjawab menyusun LAKIN Tahun 2022 sebagai pertanggungjawaban KPKNL Kisaran dalam pencapaian tujuan/sasaran strategis organisasi. Berikut ini gambaran umum dari KPKNL Kisaran sebagai instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang meliputi tugas pokok dan fungsi organisasi, struktur organisasi dan peran strategis KPKNL Kisaran.

### B. Tugas dan Fungsi

KPKNL Kisaran merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Adapun tugas dan fungsi KPKNL sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 adalah melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, KPKNL menyelenggarakan fungsi:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara.
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara.
3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara.
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.
5. pelaksanaan pelayanan penilaian
6. pelaksanaan pelayanan lelang
7. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang
8. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang
9. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
10. pelaksanaan administrasi KPKNL

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala KPKNL Kisaran senantiasa berpegang teguh pada visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu:

**“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”**

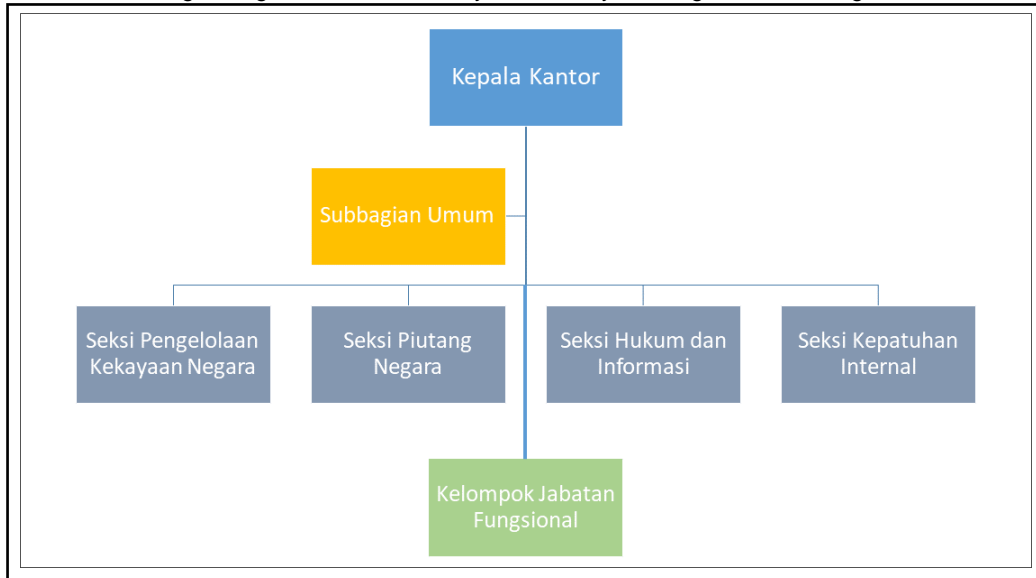
### **C. Struktur Organisasi KPKNL Kisaran**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, susunan organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran terdiri dari:

- |                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Subbagian Umum;          | 2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara |
| 3. Seksi Piutang Negara;    | 4. Seksi Hukum dan Informasi         |
| 5. Seksi Kepatuhan Internal | 6. Kelompok Jabatan Fungsional       |

Bagan susunan organisasi KPKNL Kisaran disajikan dalam gambar 1.1 di bawah ini:

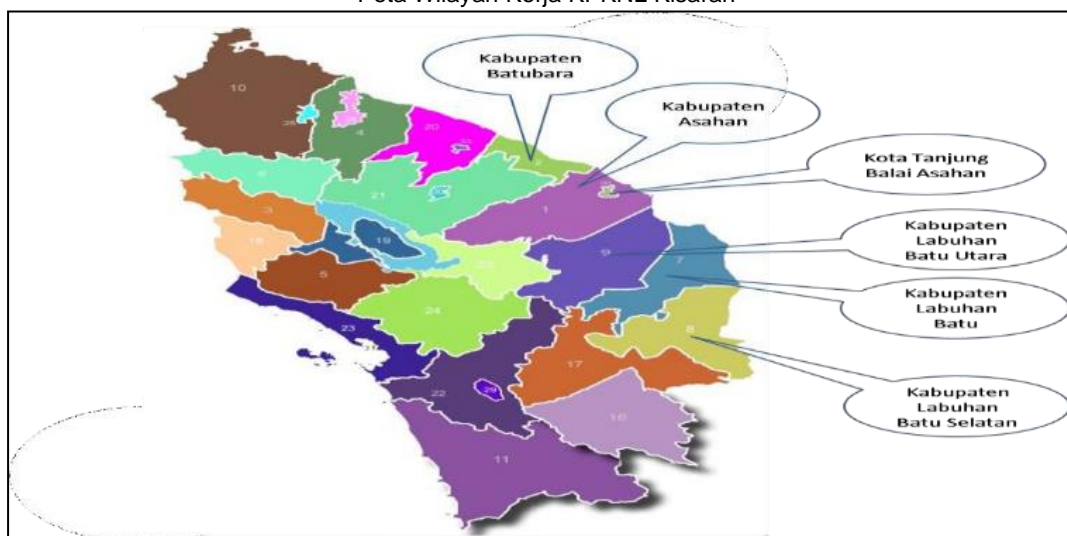
Gambar 1.1  
Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran



Wilayah kerja KPKNL Kisaran KPKNL Kisaran terdiri dari 1 (satu) kota dan 5 (lima) kabupaten yaitu:

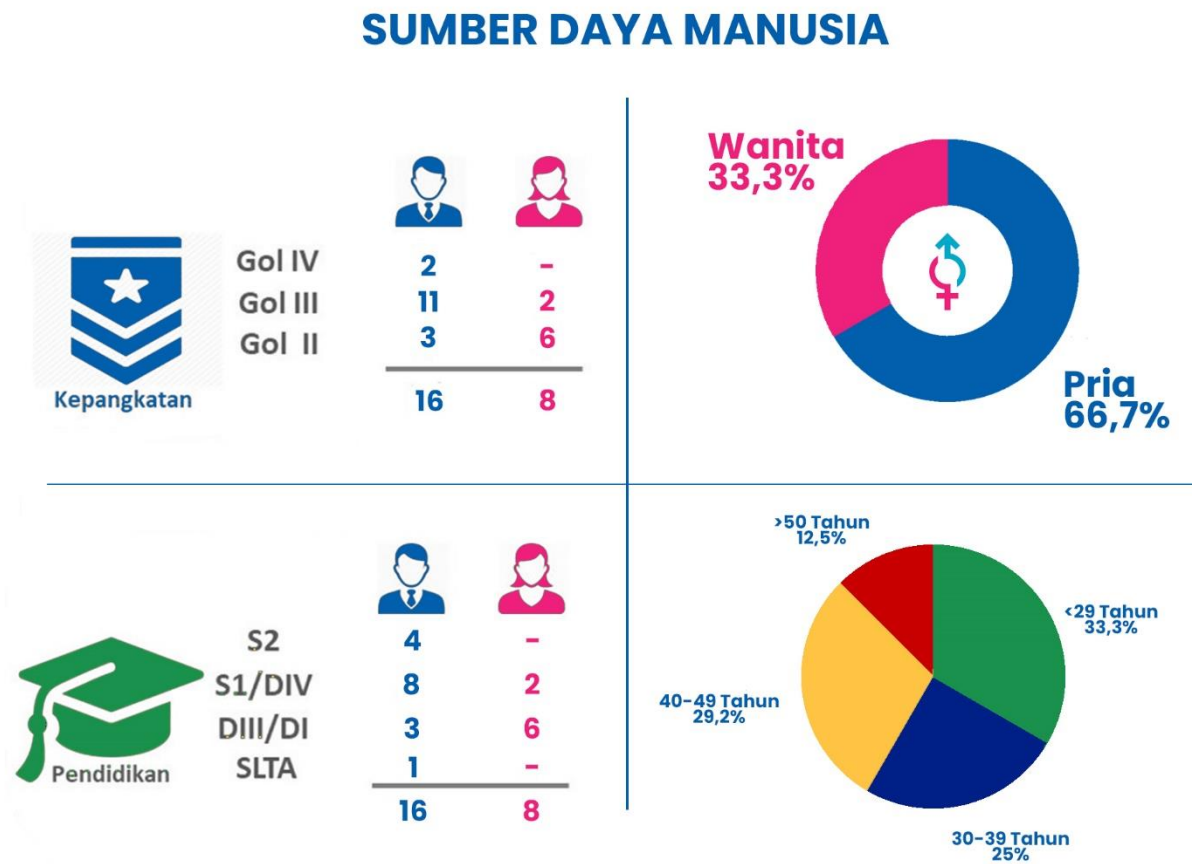
- |                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1. Kabupaten Asahan;     | 2. Kabupaten Labuhanbatu Utara   |
| 3. Kota Tanjungbalai;    | 4. Kabupaten Labuhanbatu Selatan |
| 5. Kabupaten Labuhanbatu | 6. Kabupaten Batubara            |

Gambar 1.2  
Peta Wilayah Kerja KPKNL Kisaran



KPKNL Kisaran didukung oleh 24 orang pegawai dari berbagai bidang keahlian seperti ekonomi, akuntansi, manajemen, hukum, dan lainnya. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat jabatan, golongan, pendidikan, dan gender adalah sebagai berikut:

Gambar 1.3  
Komposisi Pegawai KPKNL Kisaran Berdasarkan Jabatan dan Golongan



#### D. Peran Strategis

Sebagai organisasi yang memiliki fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang, KPKNL Kisaran memiliki peran strategis sebagai berikut:

##### a. Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola kekayaan Negara, KPKNL Kisaran turut berperan dalam mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada pemanfaatan kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara dan penatausahaan kekayaan negara. Selain itu KPKNL Kisaran selaku asset manager mengemban tugas menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara dan penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

##### b. Penilaian

Penilaian terhadap Kekayaan Negara yang merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara setelah dilakukan inventarisasi dilakukan untuk

menuju optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Tugas penilaian kekayaan negara meliputi kegiatan standarisasi, bimbingan teknis, analisis, supervisi, evaluasi dan rekomendasi dibidang penilaian. Kegiatan penilaian tersebut dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dari setiap kekayaan negara berupa tanah, bangunan, kendaraan dan barang milik negara lainnya yang berada pada lingkup Kementerian/Lembaga Negara. Kegiatan penilaian dilakukan untuk kepentingan pengambilan keputusan pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN. Dengan demikian pengelolaan kekayaan negara menjadi optimal, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *The Highest and Best Use*.

### **c. Pelayanan Lelang**

Pelayanan lelang bertujuan untuk menjadikan lelang sebagai sarana transaksi penjualan aset secara umum, sebagaimana fungsi pasar pada umumnya. Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Lelang mempunyai manfaat nilai lebih dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, efisien dan dapat lebih menjamin kepastian hukum. Risalah Lelang yang merupakan akta otentik bertungsi sebagai akta van transport untuk kepentingan peralihan hak. DJKN dinarapkan menjadi akselerator agar paradigma lelang meresap kedalam "mindset" masyarakat, sehingga memandang lelang seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Setelah berlakunya PMK Nomor 90/PMK 06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran Secara Tertulis Tapa Kenadiran Peserta Lelang Melalui Internet, lelang dapat dilaksanakan tanpa kehadiran peserta lelang. Hal ini tentu saia semakin memudahkan siapa saja untuk ikut menjadi peserta lelang.

### **d. Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pembiayaan APBN**

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterima oleh KPKNL Kisaran adalah penerimaan yang berasal dari pemanfaatan BMN. Biaya Administrasi (Biad) Pengurusan Piutang Negara merupakan hasil dan pelayanan pengurusan piutang negara yang diterima oleh KPKNL. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL memperoleh hasil berupa Bea Lelang. Kedua instrumen penerimaan tersebut selanjutnya disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

## E. Sistematika Laporan

### 1. Ikhtisar Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta langkah antisipatifnya

### 2. Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### 3. Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2022.

### 4. Bab III. Akuntabilitas Kinerja

#### a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja KPKNL Kisaran untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis. Setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan dengan cara:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan tahun 2022;
- 3) Menganalisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 4) Menganalisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 5) Menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

#### b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran untuk mewujudkan kinerja KPKNL Kisaran sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### 5. Bab IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja KPKNL Kisaran serta langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja pada tahun 2022 yang akan datang.

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

Dalam melaksanakan perencanaan kinerja, KPKNL Kisaran berpedoman pada Rencana Strategis DJKN Tahun 2020 – 2024 yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020. Rencana strategis tersebut memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan digunakan untuk mengantisipasi kondisi masa depan sehingga dapat mencapai target yang diinginkan. KPKNL Kisaran memiliki visi yang sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk tahun 2020-2024 yaitu:

**'Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat'.**

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka KPKNL Kisaran menetapkan misi seperti yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah.
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Penjabaran atas misi tersebut ditetapkan dalam suatu bentuk tujuan yang memiliki korelasi dengan misi yang telah dinyatakan sebelumnya. Tujuan KPKNL Kisaran sebagaimana tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
- b. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
- c. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
- d. Birokrasi dan layanan public DJKN yang agile, efektif, dan efisien;

Dalam kurun waktu 2020-2024, KPKNL Kisaran mempunyai arah kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara, piutang dan lelang secara profesional dan akuntabel demi terwujudnya visi dan misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Arah kebijakan dan strategi KPKNL Kisaran tahun 2020-2024 dalam

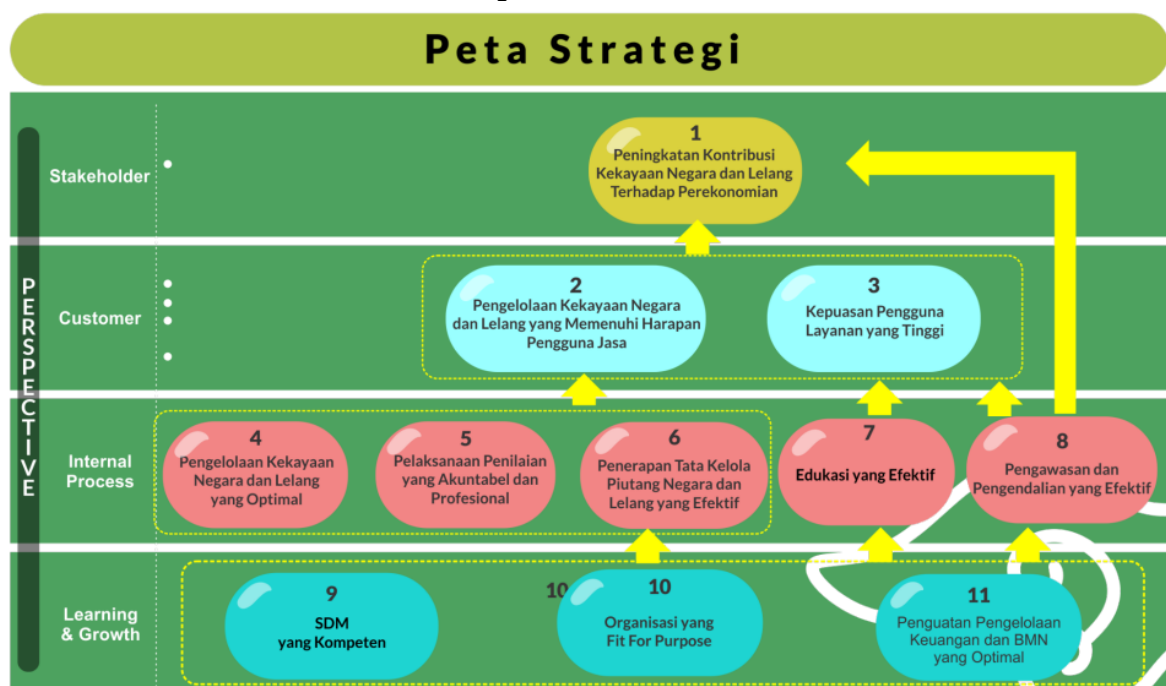
rangka mendukung pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan social adalah:
  - Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif, dan optimal;
  - Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, social, dan lainnya.
- b. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal.
- c. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas.
- d. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien adalah:
  - Organisasi dan SDM yang optimal;
  - Pengawasan dan pengendalian yang bernilai tambah;
  - Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
  - Komunikasi public yang efektif.

## B. Perjanjian Kinerja

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, perjanjian kinerja dirumuskan dalam sasaran strategi KPKNL Kisan Tahun 2020 yang tertuang dalam bentuk peta strategi KPKNL Kisan.

Gambar 2.2  
Peta Strategi KPKNL Kisan 2022



Berdasarkan *Strategy Map* Kemenkeu-*Three*, KPKNL Kisaran pada tahun 2022 menerapkan 4 perspektif, 11 Sasaran Strategis (SS) dengan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Berikut ini merupakan Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Kisaran beserta target yang telah ditetapkan untuk tahun 2022.

### **Stakeholder**

Merupakan perspektif yang berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh stakeholder. Dalam perspektif ini terdapat 1 sasaran strategis :

#### **Sasaran Strategis 1 : Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian**

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND. Selain itu, yang termasuk kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila asset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle), adanya nilai tambah BMN berupa penghematan (cost saving) dan PNBP (revenue generating), tingginya turn over penggunaan BMN persediaan, serta mendatangkan manfaat ekonomi.

Sasaran strategis ini terdiri dari 2 IKU sebagaimana disajikan dalam tabel 2.1

Tabel 2.1  
IKU KPKNL Kisaran pada SS.1

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
1.1. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	%	100
1.2. Persentase produktivitas lelang	%	36

### Customer Perspective

#### Sasaran Strategis 2 : Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Kegiatan Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaian untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara.

Sasaran strategis ini terdiri dari 2 IKU sebagaimana disajikan dalam tabel 2.2

Tabel 2.2  
IKU KPKNL Kisaran pada SS.2

Indikator Kinerja	Satuan	Target
2.1. Persentase Realisasi Pokok Lelang	%	100
2.2. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara (Saldo PNDS s.d. 2017)	%	100

#### Sasaran Strategis 3 : Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

Pelayanan publik yang prima ditandai dengan terpenuhinya seluruh aspek penyelenggaraan pelayanan public yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, system informasi, sarana dan prasarana, biaya/tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja sehingga berdampak pada terwujudnya kepuasan dan terpenuhinya harapan pengguna layanan (*exceeding customer needs*).

Kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu faktor yang merepresentasikan kualitas layanan yang diberikan kepada para pengguna layanan. Ruang lingkup layanan yang diuji tingkat kepuasannya adalah layanan yang diberikan kepada pihak eksternal. Kualitas layanan dapat dikatakan prima adalah ketika layanan yang diberikan mampu memenuhi ekspektasi pengguna layanan.

Sasaran strategis ini terdiri dari 1 IKU sebagaimana disajikan dalam tabel 2.3

Tabel 2.3.  
IKU KPKNL Kisaran SS. 3

Indikator Kinerja	Satuan	Target
3.1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	Indeks	4,82

### **Internal Process Perspective**

Berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Adapun sasaran strategis dalam perspektif ini adalah :

#### **Sasaran Strategis 4 : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal**

Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.

- a. Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila: Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle)
- b. Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (cost saving) dan PNBP (revenue generating).
- c. Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum)
- d. Adanya manfaat ekonomi (selain cost saving dan revenue), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat.
- e. Aset tertib administrasi, fisik dan hukum
- f. Piutang negara terselesaikan dengan optimal

Sasaran strategis ini terdiri dari 4 IKU sebagaimana disajikan dalam tabel 2.4

Tabel 2.4  
IKU KPKNL Kisaran pada SS.4

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
4.1 Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	%	65
4.2 Persentase Bidang Tanah yang Disertipikatkan	%	100
4.3 Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	%	100
4.4. Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	%	100

### Sasaran Strategis 5 : Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Penilaian yang akuntabel dan profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi prinsip-prinsip penilaian.

Sasaran strategis ini terdiri dari 1 IKU sebagaimana disajikan dalam tabel 2.5

Tabel 2.5  
IKU KPKNL Kisaran pada SS.5

Indikator Kinerja	Satuan	Target
5.1 Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	%	19

### Sasaran Strategis 6 : Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektivitas tercapainya tujuan organisasi. Dalam kaitannya dengan kekayaan negara, kegiatan tata kelola meliputi seluruh siklus pengelolaan BMN, KNL, KND, penilaian, piutang negara, dan lelang. Siklus tersebut diataranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.

Tata kelola yang akuntabel adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Sasaran strategis ini terdiri dari 2 IKU sebagaimana disajikan dalam tabel 2.6

Tabel 2.6  
IKU KPKNL Kisaran pada SS.6

Indikator Kinerja	Satuan	Target
6.1 Persentase Pelaksanaan Lelang <i>E-auction</i> dan <i>E-conventional auction</i>	%	92
6.2 Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	%	10

### Sasaran Strategis 7 : Edukasi yang efektif

Edukasi merupakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, pemberian masukan, konsultasi, atau arahan yang dilaksanakan dalam lingkup internal maupun eksternal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas proses bisnis yang harus

dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal sehingga output yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan dapat tercapai. Ruang lingkup edukasi adalah sebagai berikut:

1. edukasi internal dari atasan/unit superintenden kepada bawahan/unit yang diawasi,
2. edukasi eksternal dari kantor wilayah/KPKNL kepada pengguna layanan/masyarakat umum.

Materi edukasi adalah terkait dengan pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, kekayaan negara dipisahkan, pengurusan piutang negara, dan lelang. Edukasi dapat dikatakan efektif apabila pihak yang diedukasi memberikan feedback yang positif atas tingkat pemahaman materi dan proses edukasi yang telah dilakukan.

Sasaran strategis ini terdiri dari 1 IKU sebagaimana disajikan dalam tabel 2.7

Tabel 2.7  
IKU KPKNL Kisaran pada SS.7

Indikator Kinerja	Satuan	Target
7.1. Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi	Indeks	91

### Sasaran Strategis 8 : Pengawasan dan pengendalian yang efektif

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku.

Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala.

Pengendalian dan pengawasan pengelolaan BMN dapat dikatakan efektif apabila memenuhi parameter sebagai berikut:

- a. terselesaikannya sengketa/permasalahan pengelolaan BMN yang ada serta menurunnya potensi permasalahan terkait BMN di masa mendatang.
- b. Temuan aparat pemeriksa tuntas ditindaklanjuti
- c. Tidak ada temuan material/fraud terkait pengelolaan BMN
- d. Surat persetujuan pengelolaan BMN pada unit pengguna barang ditindaklanjuti.

Sasaran strategis ini terdiri dari 1 IKU sebagaimana disajikan dalam tabel 2.7

Tabel 2.8  
IKU KPKNL Kisaran pada SS.8

Indikator Kinerja	Satuan	Target
8.1 Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	%	85

### ***Learning and Growth Perspective***

Berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Adapun sasaran strategis dalam perspektif ini adalah :

#### **Sasaran Strategis 9 : SDM yang kompeten**

SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi teknis yang mumpuni, serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Upaya untuk mempersiapkan SDM yang berkompentensi tinggi untuk kepentingan jangka panjang dalam rangka memberikan dukungan dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Kisaran.

Sasaran strategis ini terdiri dari 1 IKU sebagaimana disajikan dalam tabel 2.9

Tabel 2.9  
IKU KPKNL Kisaran pada SS.9

Indikator Kinerja	Satuan	Target
91. Persentase pengembangan kompetensi pegawai	%	100

#### **Sasaran Strategis 10 : Organisasi yang *fit-for-purpose***

Organisasi yang fit for purpose adalah organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (value chain) yang selaras dengan tujuan organisasi.

Sasaran strategis ini terdiri dari 3 IKU sebagaimana disajikan dalam tabel 2.10

Tabel 2.10  
IKU KPKNL Kisaran pada SS.10

Indikator Kinerja	Satuan	Target
10.1 Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK	Indeks	75
10.1 Nilai review pengelolaan kinerja	Indeks	80
10.3 Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator	Indeks	90

### Sasaran Strategis 11 : Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal

Penguatan fungsi pengelolaan keuangan dan BMN dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi.

Salah satu sumber daya organisasi sektor publik adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan berkualitas yang ditandai dengan anggaran terserap sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapainya output, efisiensi, konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dipakain dalam pengelolaan anggaran adalah DIPA, yaitu dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja.

Sasaran strategis ini terdiri dari 22KU sebagaimana disajikan dalam tabel 2.11

Tabel 2.11  
IKU KPKNL Kisaran pada SS. 11

Indikator Kinerja	Satuan	Target
11.1 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	%	95,5
11.2 Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	%	100

### C. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2022, KPKNL Kisaran berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi maximize semua agar sebanding dengan yang lainnya;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU;
4. IKU yang ditetapkan, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi 120%
  - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

Tabel 2.11  
Perjanjian Kinerja KPKNL Kisaran Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target 2022
1.	<b>Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian</b>	1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100,00%
		1b-CP	Persentase produktivitas lelang	36,00%
2.	<b>Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi</b>	2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100,00%
		2b-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	100,00%
3.	<b>Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional</b>	3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4,82
4.	<b>Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif</b>	4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65,00%
		4b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100,00%
		4c-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100,00%
		4d-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100,00%
5.	<b>Organisasi yang fit for purpose</b>	5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	19,00%
6.	<b>Penguatan Pengelolaan</b>	6a-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92,00%

	<b>Keuangan dan BMN yang Optimal</b>	6b-CP	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	10,00%
7.	<b>Edukasi yang Efektif</b>	7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	91,00
8.	<b>Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif</b>	8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85,00%
9.	<b>SDM yang Kompeten</b>	9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	75,00%
10.	<b>Organisasi yang <i>fit for purpose</i></b>	10a-N	Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK	75,00
		10b-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80,00
		10c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90,00
11.	<b>Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal</b>	11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,50%
		11b-CP	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100,00%

## BAB III

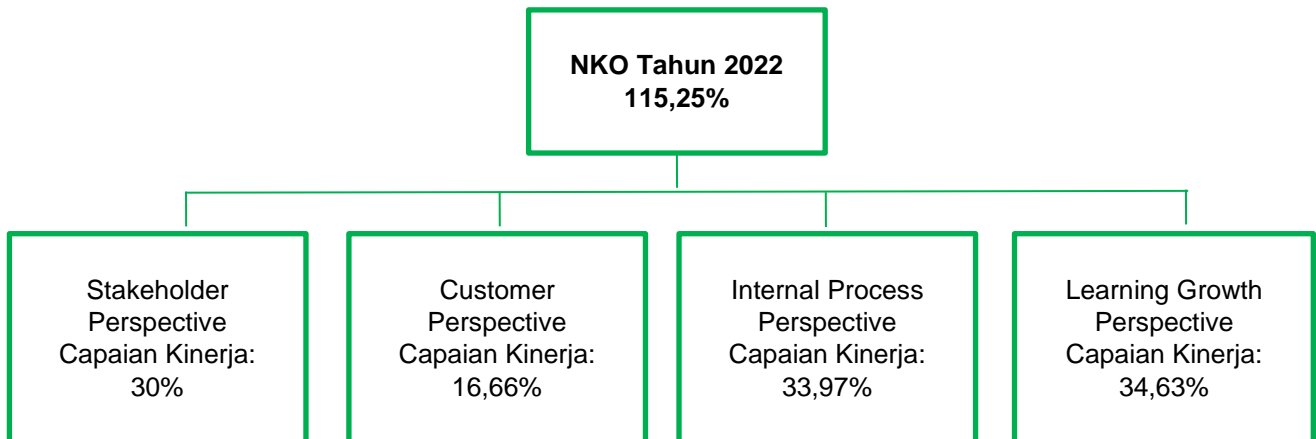
### AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai capaian kinerja KPKNL Kisaran pada tahun 2022, yang dilengkapi dengan penjelasan/narasi tentang target, realisasi dan evaluasi untuk masing-masing IKU. Kemudian akan diuraikan juga mengenai alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran untuk membiayai program yang dijalankan, yang disertai dengan penjelasan mengenai realisasi anggaran.

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

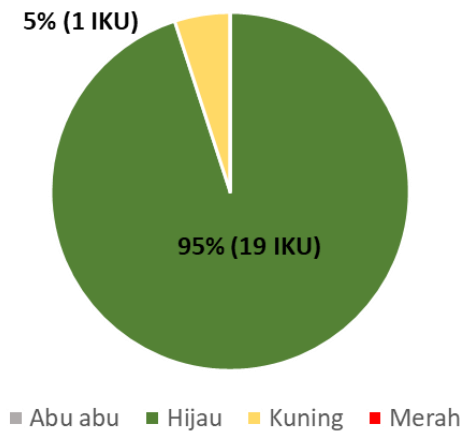
Pengukuran capaian kinerja KPKNL Kisaran tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Kisaran tahun 2022 adalah sebesar 115,25%, dengan rincian nilai pada masing-masing perspektif sebagai berikut :

Gambar 3.1  
Bagan capaian NKO per perspektif



Selama tahun 2022, dari total 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Kisaran, terdapat 19 IKU berstatus hijau dan 1 IKU berstatus kuning sebagaimana pada gambar 3.2.

Gambar 3.2  
Diagram capaian IKU KPKNL Kisaran



Berikut penjelasan dari setiap capaian IKU yang merupakan evaluasi dan analisis kinerja atas 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dicapai KPKNL Kisaran padatahuan 2022 sesuai dengan *Strategy Map* Kemenkeu-*Three* KPKNL Kisaran.

### 1. (1a-CP) Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Tabel 3.1  
Rincian Persentase Target dan Realisasi  
Penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang Tahun 2022)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	136,32%	136,32%

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Pasal 28 tentang Kementerian Keuangan, menjelaskan bahwa ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang merupakan nilai penerimaan negara yang telah masuk ke kas negara dan nilai penghematan belanja yang diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan negara dan lelang.

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang pada lingkup instansi vertikal berasal dari:

- a. PNBP Pengelolaan BMN
  - penerimaan dari hasil pemanfaatan maupun penjualan BMN pada K/L
- b. PNBP Piutang Negara (PNBP PN)
  - penerimaan dari pengurusan piutang negara
- c. PNBP Lelang (PNBP Lelang)
  - bea lelang;
  - bea lelang pegadaian;
  - denda keterlambatan penyetoran bea lelang oleh PL Kelas II/Balai Lelang;
  - biaya permohonan lelang;
  - penerimaan dari uang jaminan pembeli wanprestasi;
  - pemberian izin operasional Balai Lelang;
  - pengangkatan dan perpanjangan PL Kelas II;
  - perolehan kertas sekuriti oleh PL Kelas II, dan
  - penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Berdasarkan komponen tersebut, realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah sebesar Rp4.846.352.271,00 dari target sebesar Rp3.555.000.000,00 atau dalam capaian persentase sebesar 136,32% dengan rincian per masing-masing komponen, sebagai berikut :

Tabel 3.2

Rincian Target dan Realisasi per komponen capaian

Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang Tahun 2022 (dalam rupiah)

Jenis Capaian	Target	Realisasi	Persentase
Capaian PNBP Pengelolaan BMN	1.350.000.000	1.880.405.426	139,29%
Capaian PNBP PN	5.000.000	793.120	15,86%
Capaian PNBP Lelang	2.200.000.000	2.965.153.725	134,78%
<b>Total</b>	<b>3.555.000.000</b>	<b>4.846.352.271</b>	<b>136,32%</b>

Kendala dalam pencapaian target IKU persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang selama periode tahun 2022, yaitu:

1. rendahnya tingkat harga sewa (seperti: kantin dan ATM) dan harga jual lelang;
2. rendahnya frekuensi penjualan di wilayah kerja KPKNL Kisaran;
3. alamat debitur yang telah pindah dan tidak jelas (dibuktikan dengan sebagian besar surat pengurusan piutang negara yang telah dikirimkan kembali ke KPKNL Kisaran) serta tidak adanya itikad baik dari debitur untuk menyelesaikan hutang;
4. tidak adanya itikad baik dari debitur untuk menyelesaikan hutang dan debitur tidak mengakui hutangnya;
5. beberapa debitur telah meninggal dunia dan keberadaan ahli waris tidak diketahui.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyelesaian target IKU dimaksud pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan satker yang berpotensi terhadap PNBPN untuk mendorong Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN;
2. Penyampaian surat himbauan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN agar satuan kerja mengajukan
3. Melakukan monitoring terhadap satker yang telah memperoleh Surat Persetujuan Pemanfaatan BMN.
4. Pembinaan kepada Satuan Kerja melalui surat untuk melaksanakan penjualan BMN dalam kondisi RB melalui lelang.
5. Optimalisasi pengurusan piutang negara dengan meningkatkan tahap pengurusan piutang negara;
6. Penelitian dan penagihan langsung ke lapangan;
7. Peningkatan tahap pengurusan melalui pengurusan piutang sederhana
8. Penyelesaian hutang dengan keringanan melalui mekanisme crash program
9. Edukasi dan komunikasi terhadap penyerah piutang.
10. Penggalan potensi lelang.
11. Edukasi dan komunikasi permohonan dan pelaksanaan lelang kepada stakeholders.

Isu Utama dan Implikasi (apa yang terjadi dan implikasinya?):

1. Sampai dengan Triwulan IV capaian IKU Persentase pengelolaan kekayaan negara dan lelang sebesar 136,32%.
2. Capaian atas IKU persentase pengelolaan kekayaan negara dan lelang telah melampaui target *trajectory* (tahunan).

3. Dalam rangka menghadapi target tahun 2022 perlu adanya rencana yang matang, peningkatan koordinasi dengan kantor pelayanan, dan bidang-bidang terkait.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?):

Dari sisi capaian PNBP pengelolaan BMN, target telah terlampaui, namun demikian capaian tersebut dapat lebih dioptimalkan jika harga sewa (seperti: kantin dan ATM) dan harga jual lelang ditingkatkan. Terhadap realisasi capaian PNBP PN, faktor tidak tercapainya target triwulan IV 2022 karena sebagian besar BKPN yang tidak didukung oleh barang jaminan dan tidak adanya itikad baik dari debitur untuk menyelesaikan hutang menghambat pencapaian target.

Rekomendasi Rencana Aksi untuk tahun 2023:

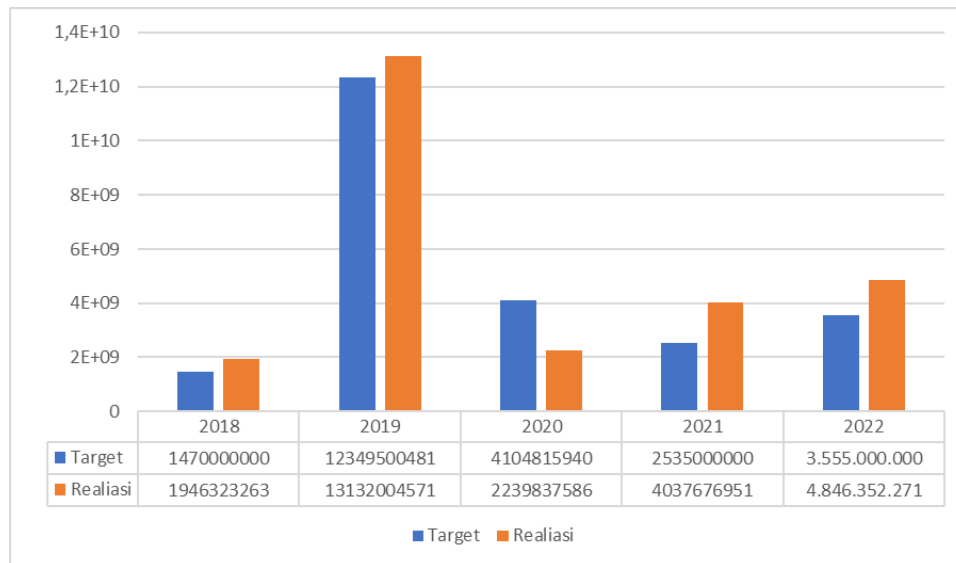
1. Melakukan penggalan potensi PNBP dari pengelolaan BMN.
2. Melakukan 'jemput bola' untuk usulan sewa dan penjualan BMN pada satker yang memiliki potensi.
3. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN Kewenangan KPKNL.
4. Peningkatan proses tahapan pengurusan piutang Negara termasuk pemberitahuan surat paksa atas 8 (delapan) BKPN penyerahan 2022.
5. *Clustering* BKPN dan memilah yang potensial.
6. Penggalan potensi piutang ke pemerintah kabupaten ke wilayah kerja KPKNL Kisaran.
7. Melakukan penelitian lapangan dan penagihan langsung ke debitur.
8. Penggalan potensi lelang.

Data historis target dan realisasi IKU persentase pengelolaan kekayaan negara dan lelang pada KPKNL Kisaran tahun 2018 sampai dengan 2022 disajikan dalam tabel dan diagram di bawah ini:

Tabel 3.3  
Perbandingan Target dan Realisasi Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang  
Periode Tahun 2018 s.d. 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Target	1.470.000.000	12.349.500.481	4.104.815.940	2.535.000.000	3.555.000.000
Realisasi	1.946.323.263	13.132.004.571	2.239.837.586	4.037.676.951	1.846.352.271

Gambar 3.3  
Diagram Perbandingan Target dan Realisasi  
Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang  
Periode Tahun 2018 sd. 2022



## 2. (1b-CP) Persentase produktivitas lelang

Tabel 3.4  
Rincian Target dan Realisasi  
Persentase Produktifitas Lelang Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase produktivitas lelang	36%	46,26%	128,49%

Pelaksanaan lelang yang optimal dapat teridentifikasi dari hasil lelang yang kompetitif dengan terjualnya barang yang dilelang minimal sesuai dengan harga dasar/limit lelang dan memberikan kontribusi bagi penerimaan negara. Salah satu aspek penting dalam proses tersebut adalah dengan menetapkan jumlah frekuensi lelang dimana makin banyak frekuensi lelang maka potensi kontribusi penerimaan negara pun makin besar. Adapun indikator ini diukur dengan jumlah risalah lelang yang diterbitkan oleh pejabat lelang selama tahun 2022.

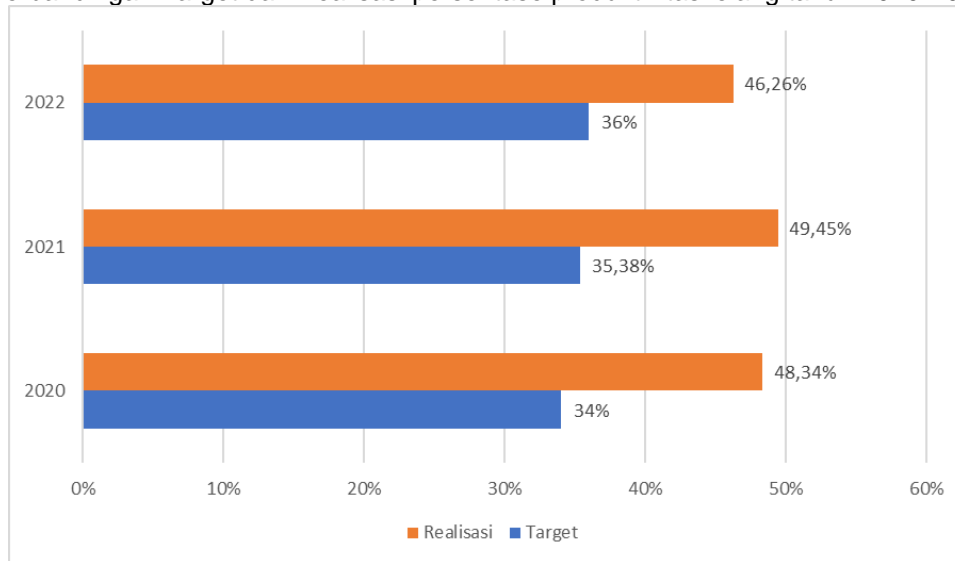
Pada tahun 2022 target frekuensi lelang sebanyak 36% dan realisasi pelaksanaan lelang selama tahun 2022 berjumlah 46,26%. Adapun frekuensi lelang secara keseluruhan pada tahun 2022 berjumlah 454 dengan frekuensi lelang laku secara keseluruhan berjumlah 210.

Data historis target dan realisasi IKU persentase produktivitas lelang tahun 2020 sampai dengan 2022 disajikan dalam table 3.5.

Tabel 3.5  
Perbandingan Target dan Realisasi persentase produktivitas lelang tahun 2020-2022

Uraian	2020	2021	2022
Target	34%	35,38%	36%
Realisasi	48,34%	49,45%	46,26%
Kinerja (%)	142,18%	141,29%	128,49%

Gambar 3.4  
Perbandingan Target dan Realisasi persentase produktivitas lelang tahun 2020-2022



Adapun kendala-kendala yang dihadapi sama dengan indikator kinerja terkait dengan persentase produktivitas lelang.

Isu utama dan implikasi:

1. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 capaian IKU persentase produktivitas lelang sebesar 128,49% dengan persentase produktivitas lelang sebesar 46,26% dari target 36%, namun demikian tetap diperlukan langkah-langkah preventif untuk meminimalisasi tidak tercapainya target lelang.
2. Untuk periode Tahun 2023, target yang ditetapkan untuk IKU ini akan lebih menantang, sehingga perlu dilakukan mitigasi untuk triwulan berikutnya agar kinerja dapat ditingkatkan

Akar masalah : Potensi lelang TAP

Rekomendasi rencana aksi : Melakukan koordinasi dengan pemohon lelang setiap bulan.

### 3. (2a-CP) Persentase realisasi pokok lelang

Tabel 3.6  
Rincian Target dan Realisasi  
Persentase Realisasi Pokok Lelang Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase pokok lelang	60.000.000.000	91.391.786.417	152,32%

Pada tahun 2022, komponen IKU persentase hasil lelang diperoleh dari persentase realisasi jumlah pokok lelang kelas I dan pegadaian. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I dan Pegadaian dalam periode tertentu. Sementara untuk bea lelang diperhitungkan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian Keuangan. Bea lelang yang diperhitungkan pada capaian IKU ini termasuk bea lelang pegadaian

Adapun target jumlah pokok lelang pada tahun 2022 pada KPKNL Kisaran adalah sebesar Rp60.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp91.391.786.417,00. KPKNL Kisaran sudah berupaya mengoptimalkan kinerja dari sumber daya yang ada dan kinerja dari fungsional pelelang. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi melalui media sosial dan adanya klinik konsultasi lelang secara tetap muka dan non tatap muka demi meningkatkan koordinasi dengan antara KPKNL Kisaran dan Bidang Lelang Kanwil DJKN Sumatera Utara serta Optimalisasi penggalan potensi lelang dan himbauan lelang *e-auction* secara berkesinambungan, hingga terwujudnya pelaksanaan lelang *e-auction* dengan frekuensi dan pokok lelang yang optimal menjadi kunci dalam keberhasilan pencapaian target lelang tersebut.

Tabel 3.7  
Rincian Capaian Persentase Hasil Lelang Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Kinerja
Pokok Lelang Kelas I	35.000.000.000	56.695.954.517	161,99%
Pokok Lelang Pegadaian	25.000.000.000	34.695.831.900	138,78%
<b>Rata-rata persentase</b>			<b>152,32%</b>

Dalam pencapaian tersebut khususnya pelaksanaan lelang di lingkup KPKNL Kisaran, terdapat kendala yang dihadapi, yaitu:

- a. Kurangnya jenis barang yang dijual lelang dengan potensi membentuk harga yang tinggi.
- b. Jumlah barang terjual masih lebih sedikit dibanding barang tidak ada peminat.
- c. Frekuensi lelang noneksekusi sukarela yang belum optimal.

Dalam mengatasi kendala tersebut, telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi melalui surat dan kunjungan ke beberapa instansi/perusahaan potensial untuk mengenalkan lelang kepada masyarakat.
- b. Melakukan sosialisasi dan penggalan potensi lelang kepada instansi yang dinilai potensial dan mempunyai pengaruh besar pada kegiatan bisnis di wilayah kerja KPKNL Kisaran.
- c. Melakukan sosialisasi dan penggalan potensi lelang kepada instansi yang memiliki barang dengan potensi nilai jual yang tinggi.
- d. Melakukan penyebarluasan pengetahuan tentang lelang kepada masyarakat.
- e. Melakukan sosialisasi melalui media surat dan kunjungan ke instansi-instansi mengenai penjualan lelang noneksekusi sukarela yang dapat dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I yang berkedudukan di KPKNL.

Dalam mitigasi kendala yang mungkin timbul pada periode yang akan datang, langkah antisipatif yang dilakukan adalah:

- a. Meningkatkan frekuensi sosialisasi lelang dengan memperluas sasaran sosialisasi sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai sarana penjualan alternatif.
- b. Membuat target sosialisasi dan penggalan potensi lelang yang tepat sasaran, guna mendapatkan jumlah frekuensi lelang yang optimal selama tahun 2022.
- c. Melakukan pendekatan persuasif kepada calon pengguna jasa lelang yang potensial.
- d. Memperluas jangkauan sosialisasi dan meningkatkan dialog dengan masyarakat, khususnya mengenai kelebihan lelang agar menumbuhkan keinginan masyarakat untuk menggunakan jasa penjualan lelang.
- e. Memberikan perhatian lebih kepada calon pengguna jasa potensial jenis lelang noneksekusi sukarela, khususnya untuk pemohon BUMN, swasta perorangan dan badan hukum agar menggunakan lelang sebagai sarana penjualan aset/aktiva tidak aktifnya.
- f. Membangun database bidang lelang terkait kegiatan pembinaan, pengendalian mutu,

dan pemeriksaan kinerja pejabat lelang.

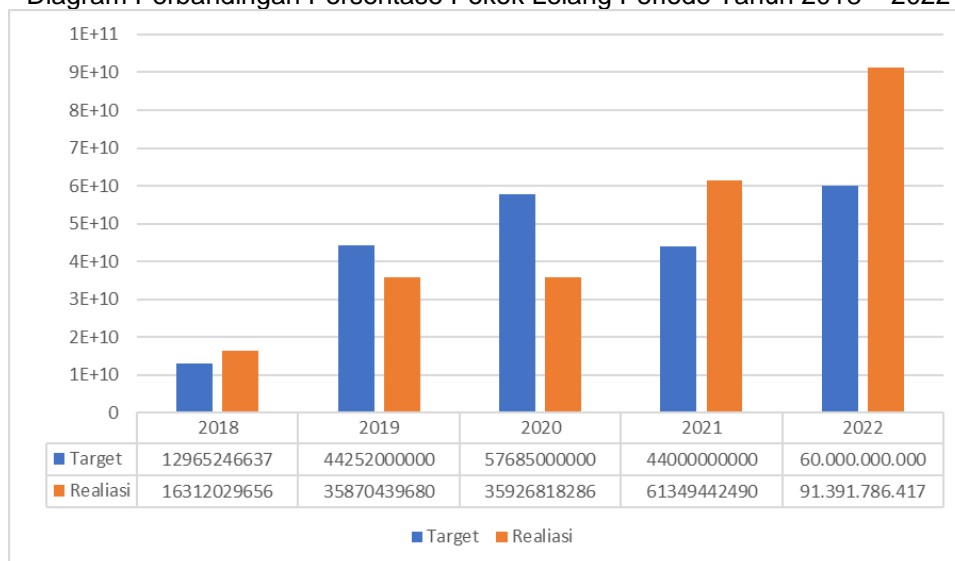
- g. Publikasi lelang yang lebih maksimal untuk memasyarakatkan lelang DJKN sebagai salah satu alternatif jual beli yang transparan, komersil dan menguntungkan.
- h. Melakukan penggalian potensi lelang ke pengguna jasa pelayanan lelang perbankan maupun non perbankan, melakukan edukasi terkait lelang ke pengguna jasa lelang melalui sosialisasi pelaksanaan lelang khususnya lelang Hak Tanggungan, melakukan koordinasi dengan perbankan untuk menyampaikan rencana lelang yang berpotensi laku
- i. Meningkatkan koordinasi dengan perbankan untuk menyampaikan rencana lelang yang berpotensi laku per triwulan.

Data historis target dan realisasi IKU Pokok Lelang pada KPKNL Kisaran tahun 2017 sampai dengan 2021 disajikan dalam tabel dan diagram berikut ini:

Tabel 3.8  
Tabel Perbandingan Persentase Pokok Lelang Periode Tahun 2018 – 2022

Uraian		2018	2019	2020	2021	2022
Pokok Lelang	Target	12.965.246.637	44.252.000.000	57.685.000.000	44.000.000.000	60.000.000.000
	Realisasi	16.312.029.656	35.870.439.680	35.926.818.286	61.349.442.490	91.391.786.417
	(%)	125,81%	81,06%	62,28%	139,43%	152,32%

Gambar 3.5  
Diagram Perbandingan Persentase Pokok Lelang Periode Tahun 2018 – 2022



- Isu utama dan implikasi:

1. Sampai dengan Triwulan IV capaian IKU persentase pokok lelang sebesar 139,43%.
2. Untuk periode Tahun 2023, target yang ditetapkan untuk IKU ini akan lebih

menantang, sehingga perlu tetap dimitigasi langkah-langkah untuk triwulan berikutnya agar kinerja dapat ditingkatkan

- Akar masalah :  
Potensi masalah tidak ada peminat (TAP) terhadap pelaksanaan lelang
- Tindakan yang telah dilakukan:
  1. Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder dan pemohon lelang;
  2. Menghimbau pemohon lelang untuk mengajukan barang yang *marketable*.
- Rekomendasi rencana aksi:
  1. Melakukan penggalian potensi lelang selama tahun 2023;
  2. Koordinasi dengan Bidang Lelang Kanwil DJKN Sumatera Utara pada setiap bulan.

#### 4. (2b-CP) Persentase penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)

Tabel 3.9  
Rincian Target dan Realisasi  
Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase penurunan outstanding piutang negara	250.000.000	2.675.626.275	1070,25%

IKU Tingkat Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Penurunan Outstanding Piutang Negara diperoleh dari penurunan outstanding piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2017. Data tersebut diperoleh dari Aplikasi FocusPN. Data target masing-masing Kanwil/KPKNL berdasarkan outstanding masing-masing KPKNL di wilayahnya. Kriteria pengakuan capaian atas IKU tersebut adalah untuk BKPN dengan SP3N s.d 31 Desember 2017, sebagai berikut:

- Angsuran
- Pelunasan
- Penarikan/ Pengembalian
- Pelunasan
- PSBDT
- Keringanan hutang terhadap BKPN dengan SP3N per 31 Desember 2017 atau sebelumnya yang lunas pada tahun 2021.

IKU tingkat penurunan outstanding piutang negara diperoleh dari Berkas Kasus Piutang Negara aktif. Jumlah penurunan outstanding yang menjadi target KPKNL Kisaran Tahun 2022 adalah Rp250.000.000. KPKNL Kisaran berhasil menghimpun penurunan outstanding Rp2.675.626.275 atau sebesar 1070,25%. Jumlah tersebut diperoleh dari pelunasan sebanyak 5 BKPN, pengembalian BKPN sebanyak 1 BKPN dan pengurusan piutang negara

melalui tahapan PSBDT sebanyak 10 BKPN.

Capaian tingkat penurunan outstanding piutang negara tahun 2022 telah melampaui target yang ditetapkan dalam kontrak kinerja disebabkan keberhasilan upaya penagihan yang dilakukan kepada debitur baik berupa pembayaran angsuran maupun pelunasan. Sedangkan terhadap debitur yang tidak ditemukan alamat/domisilinya telah ditetapkan PSBDT.

## 5. (3a-CP) Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL

Tabel 3.10  
Rincian Target dan Realisasi  
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL Kisaran Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,82	4,92	102,07%

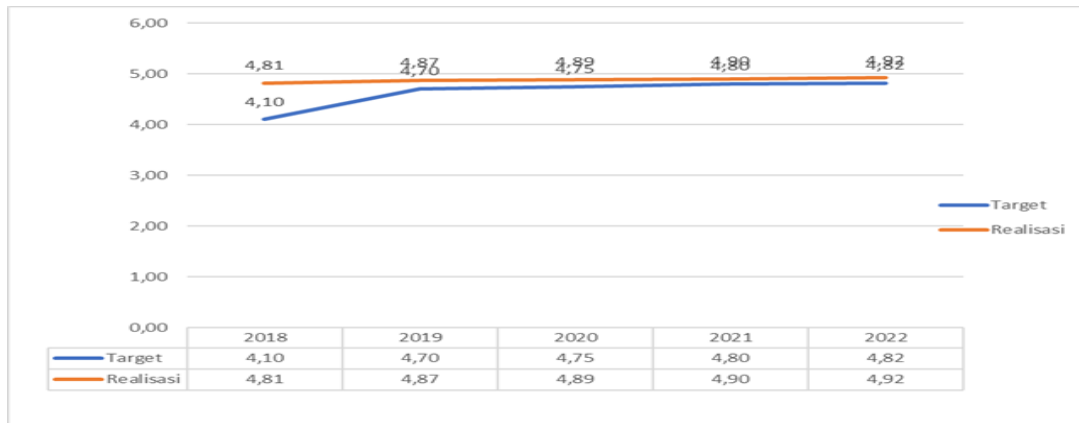
Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan nilai kepuasan pelanggan atas pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan. Pelaksanaan survei lebih difokuskan pada penilaian atas penyelesaian layanan unggulan (*quick win*) dengan memberikan kuesioner kepada pengguna layanan. Survei dilakukan oleh pihak internal DJKN atau pihak eksternal DJKN (pihak independen)

Capaian Indeks kepuasan pengguna layanan tahun 2022 adalah sebesar 4,92 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 4,90. Hal ini karena adanya peningkatan pelayanan kepada Pengguna Barang/Satuan Kerja dengan melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis, layanan konsultasi, dan koordinasi dengan Pengguna Barang/Satuan Kerja, dengan memperhatikan standar operasional prosedur yang berlaku serta menunjukkan peningkatan layanan yang diberikan KPKNL Kisaran kepada pengguna layanana.

Data historis target dan realisasi IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan pada KPKNL Kisaran tahun 2018 sampai dengan 2022 disajikan dalam diagram di bawah ini:

Gambar 3.6

Diagram Perbandingan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL Kisaran  
Periode Tahun 2018 – 2022



Pencapaian target Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL Kisaran tahun 2022 tersebut tidak terlepas dari komitmen seluruh pegawai untuk memberikan layanan yang prima kepada pengguna layanan serta terciptanya inovasi-inovasi KPKNL Kisaran yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan. Disamping itu, peran publikasi yang terus-menerus dilakukan baik melalui media cetak, elektronik, dan sosial memberikan kemudahan kepada para pengguna layanan dalam mendapatkan informasi.

## 6. (4a-CP) Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Tabel 3.11

Rincian Target dan Realisasi

Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	65%	73,43%	112,96%

IKU tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN merupakan salah satu *tools* untuk mendukung kegiatan pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal. Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

- Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle)
- Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (cost saving) dan PNPB (revenue generating).
- Tingginya *turn over* penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum)
- Adanya manfaat ekonomi (selain cost saving dan revenue), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat.

Capaian IKU tersebut diukur melalui perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

Capaian IKU tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK tahun 2022 sebesar 73,43% telah melampaui target yang ditentukan yaitu sebesar 65%, sehingga indeks capaian IKU adalah sebesar 112,96%.

Dalam upaya pencapaian target yang telah ditetapkan, terdapat beberapa kendala yang ditemui. Kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya pemahaman dari satuan kerja atas peraturan barang milik negara (BMN) terkait SBSK;
- b. Satker kurang memahami pengisian form yang dibutuhkan dalam penghitungan/kertas kerja;
- c. Pencatatan BMN tidak sesuai dengan target SBSK

Adapun kendala-kendala yang ditemui dapat diatasi dengan dilakukannya langkah- langkah penanganan masalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi kepada satuan kerja mengenai peraturan BMN terkait SBSK, baik yang diselenggarakan oleh KPKNL maupun yang diselenggarakan oleh satuan kerja;
- b. Melakukan edukasi dan asistensi mengenai pengisian form;
- c. Melakukan koordinasi dengan satker yang memiliki perhitungan SBSK yang rendah.

Rekomendasi rencana aksi:

Melakukan peninjauan lapangan ke satuan kerja

## 7. (4b-CP) Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan

Tabel 3.12  
Rincian Target dan Realisasi  
Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	629	686	109,06%

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah. Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

1. Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat
2. Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik
3. Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertifikatkan
4. K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN

yang tidak memiliki permasalahan

5. Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus clean and clear (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertifikatkan
6. Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan.

Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2022 adalah sampai dengan tahapan ke-6, yaitu pelaksanaan sertifikasi atas bidang tanah BMN.

Capaian persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan tahun 2022 adalah 686, capaian ini telah melampaui target yaitu sebesar 629 bidang tanah atau capaian sebesar 109,06%. Persentase capaian 2022 meningkat dari tahun 2021 yang capaiannya sebesar 100%. Keberhasilan capaian ini antara lain dikarenakan data tanah yang tersaji dalam aplikasi SIMANTAP relatif terjaga validitasnya karena adanya dukungan dan sikap proaktif satuan kerja dalam penyajian data.

Dalam upaya pelaksanaan target sertifikasi tahun 2022 tersebut, terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi, diantaranya:

- a. Kendala pada migrasi aplikasi pada Kantor Pertanahan;
- b. Kurangnya SDM pada Kantor Pertanahan yang memiliki target banyak
- c. Ketidakeengkapan berkas dari satuan kerja.

Adapun terhadap kendala-kendala tersebut, KPKNL Kisaran dalam hal ini Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan rapat pembahasan BMN berupa tanah dengan Kantor Pertanahan dan Satuan Kerja;
- b. Mendorong Kantor Pertanahan untuk melakukan koordinasi secara berjenjang ke Kantor Pusat BPN
- c. Monitoring dan evaluasi atas kegiatan sertifikasi BMN berupa tanah; dan
- d. Mendorong satuan kerja untuk segera melengkapi berkas.

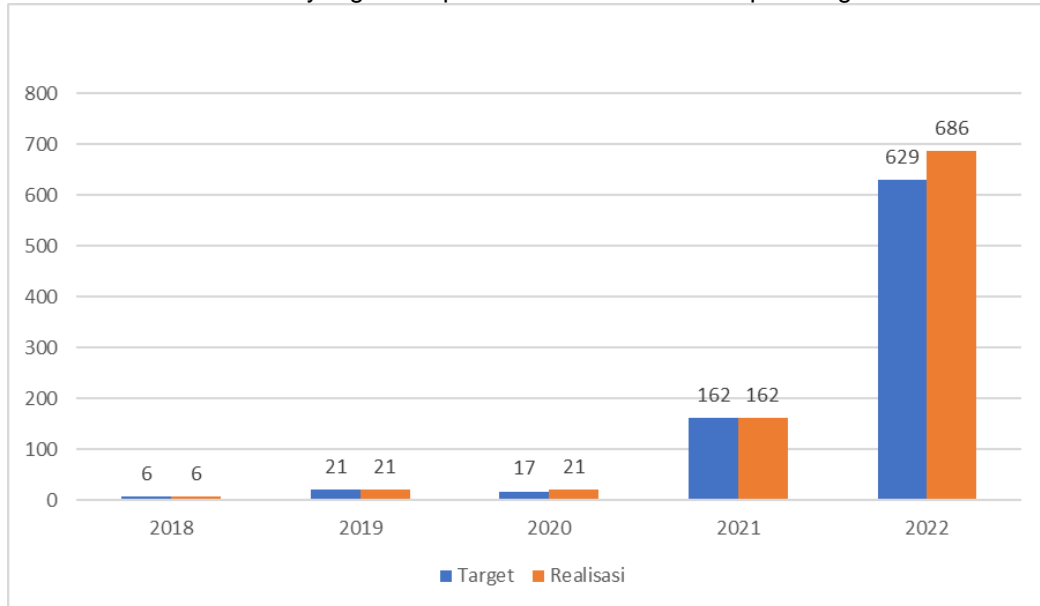
Data historis target dan realisasi IKU persentase tanah BMN yang disertifikatkan pada KPKNL Kisaran tahun 2018 sampai dengan 2022 disajikan dalam table 3.13.

Tabel 3.13  
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Tanah BMN yang Disertifikatkan Tahun 2018 dengan 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Target	6	21	17	162	629
Realisasi	6	21	21	162	686
Kinerja (%)	100%	100%	123,53%	100%	109,06%

Gambar 3.7

Perbandingan Target dan Realisasi  
Persentase tanah BMN yang disertipikatkan Tahun 2018 sampai dengan 2022



Guna pencapaian yang lebih baik di tahun 2023, langkah-langkah atau rencana aksi yang dilaksanakan antara lain:

- a. Koordinasi dengan satker yang memiliki bidang tanah yang belum disertipikatkan untuk menjadi pengganti terhadap tanah yang tidak dapat dilanjutkan penerbitan sertipikatnya.
- b. Menyampaikan himbauan kepada satuan kerja wilayah untuk melakukan *updating* data SIMANTAP dan *update* aplikasi ke versi terbaru;
- c. Menyampaikan himbauan kepada satuan kerja untuk melaksanakan pemetaan dan inventarisasi terkait pengelolaan BMN berupa tanah Satuan Kerja.

#### 8. (4c-CP) Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN

Tabel 3.14  
Rincian Target dan Realisasi  
Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN Tahun 2022

Indikator Kerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	10	16	160,00%

IKU Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN.

Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan BKPN Lunas, BKPN Penarikan, BKPN dikembalikan, dan BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). KPKNL Kisaran menyelesaikan BKPN sebanyak 16 dari 10 yang ditargetkan atau sebesar 160%. Pencapaian tersebut adalah wujud dari optimalisasi pengurusan piutang negara melalui mekanisme pelunasan baik regular maupun crash program, pengembalian BKPN sesuai dengan arahan Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan proses tahapan PSBDT.

Capaian persentase efektivitas penyelesaian BKPN pada tahun 2022 tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan yang diantaranya:

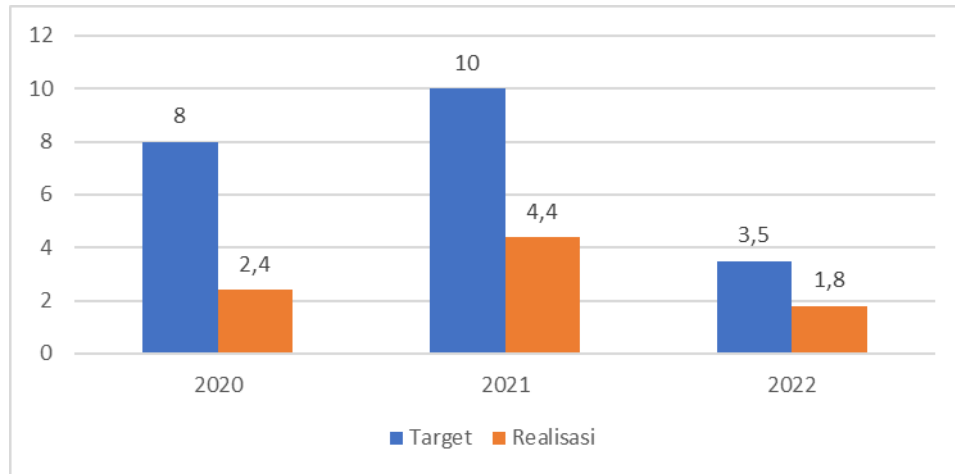
- a. Aplikasi Focus PN yang membantu KPKNL untuk memetakan prioritas BKPN yang diperkirakan cukup potensial guna menunjang capaian IKU;
- b. Pembinaan SDM pada KPKNL Kisaran terkait peraturan-peraturan tentang pengurusan Piutang Negara akurasi dan percepatan penyampaian data laporan sebagai salah satu instrument/alat ukur kinerja yang bersifat memberikan pedoman terhadap pengukuran kinerja dan efektivitas kegiatan KPKNL;
- c. Perbantuan SDM yang bersifat perbantuan langsung dalam upaya penagihan kepada penyerah utang dan juga perbantuan secara administrasi terkait pengelolaan BKPN.

Data historis target dan realisasi IKU persentase efektivitas penyelesaian BKPN tahun 2020 sampai dengan 2022 disajikan dalam table 3.14

Tabel 3.15  
Perbandingan Target dan Realisasi  
Persentase efektivitas penyelesaian BKPN tahun 2020 s.d. 2022

Uraian	2020	2021	2022
Target	8	14	10
Realisasi	10	15	16
Kinerja (%)	125%	107,14%	160,00%

**Gambar 3.8**  
**Perbandingan Target dan Realisasi**  
**Persentase efektivitas penyelesaian BKPN tahun 2020 s.d. 2022**



Meskipun kinerja telah melampaui target, namun dari hasil evaluasi masih terdapat beberapa kendala dalam pencapaiannya:

- a. Masih terdapatnya kesalahan dalam Pelaporan Realisasi bulanan, hal ini mengakibatkan tidak akuratnya pengukuran kinerja dan kesulitan menentukan prioritas kegiatan dalam capaian IKU;

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian target adalah:

- a. Optimalisasi pengurusan piutang negara dengan meningkatkan tahap pengurusan piutang negara;
- b. Verifikasi laporan dan penyediaan sistem untuk pengecekan;
- c. Prioritas kepada penyelesaian persuasif dengan menyusun prioritas debitur yang potensial dan penagihan secara langsung serta memanfaatkan media masa untuk melaksanakan panggilan kepada Penanggung Hutang;
- d. Sosialisasi kepada penyerah utang terkait peraturan-peraturan tentang pengurusan Piutang Negara.

Guna menghadapi IKU persentase efektivitas penyelesaian BKPN pada tahun 2023, KPKNL Kisaran dalam hal ini Seksi Piutang Negara telah menyusun rencana kerja sebagai bentuk mitigasi pencapaian target pada tahun 2023, yaitu:

- a. Mapping atas Piutang Negara;
- b. Peningkatan proses tahapan pengurusan piutang Negara termasuk pemberitahuan surat paksa atas 8 (delapan) BKPN penyerahan 2022;
- c. *Clustering* BKPN dan memilah yang potensial;
- d. Melakukan penelitian lapangan dan penagihan langsung ke debitur.

- e. Pembinaan kualitas SDM terkait administrasi pengurusan piutang negara
  - 1) Peningkatan kegiatan administrasi kegiatan pengurusan piutang negara dengan berkoordinasi dengan Bidang Piutang Negara Kanwil DJKN Sumatera Utara, berupa *Updating* data Focus PN, *Update* Kartu Monitor kegiatan PN dan Laporan kegiatan bulanan (Kepdirjen 207/2017);
  - 2) Sosialisasi peraturan terkait pengurusan piutang negara, peningkatan kualitas pelayanan SDM Piutang Negara.

Isu utama dan implikasi:

- a. Sampai dengan triwulan IV capaian IKU persentase efektivitas penyelesaian BKPN sebesar 160,00%.
- b. Target tahun 2023 akan lebih menantang, sehingga perlu dilakukan mitigasi agar kinerja tetap dapat dipertahankan atau ditingkatkan.

Akar masalah:

Tantangan untuk meningkatkan pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dan penagihan piutang negara.

Rekomendasi rencana aksi :

- a. Koordinasi dengan penyerah Piutang;
- b. Mapping potensi piutang Negara dan penyusunan rencana kerja 2023

## 9. (4d-CP) Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)

Tabel 3.16

Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) Tahun 2020 dengan 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	50	70	140,00%

IKU Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara.

Melalui evaluasi kinerja BMN, diharapkan dapat mewujudkan struktur portofolio aset negara yang mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada publik melalui rekomendasi skema pengelolaan aset yang lebih baik bagi Pengguna dan Pengelola Barang.

Capaian Evaluasi kinerja BMN tahun 2022 adalah 70 dari target sebanyak 50 atau secara persentase sebesar 140,00%. Dalam pelaksanaannya masih dijumpai kendala yaitu satuan kerja belum menyajikan data yang benar dan tepat untuk disajikan dalam laporan Monev BMN, sehingga hal tersebut perlu dilakukan tindak lanjut yaitu:

- a. Melaksanakan koordinasi intensif dengan Satuan Kerja;
- b. Asistensi kepada satuan kerja

Langkah-langkah yang dilaksanakan untuk mendukung capaian di tahun 2022 yaitu:

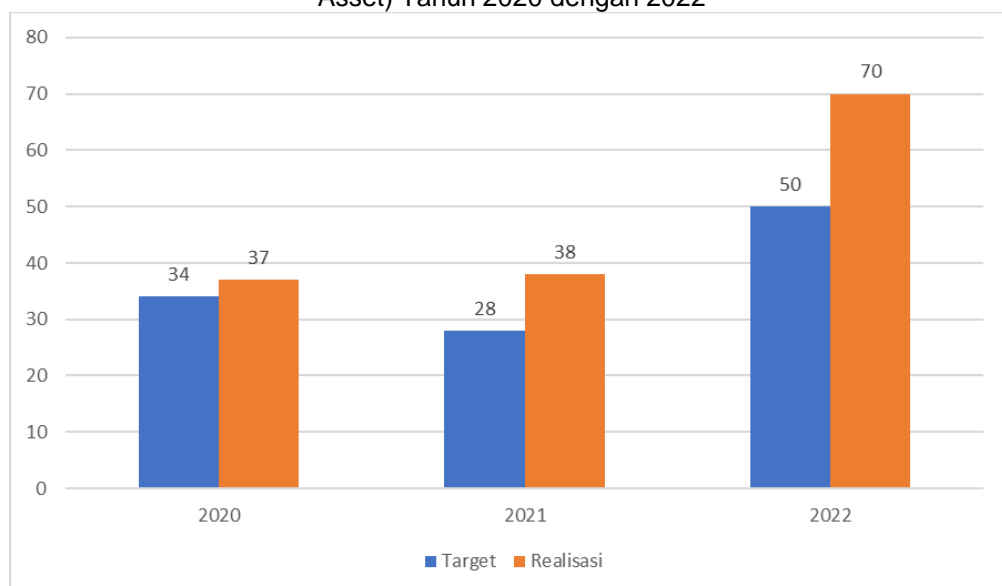
- a. Melakukan koordinasi dan edukasi kepada satuan kerja
- b. Menyampaikan himbauan kepada satuan kerja untuk melaksanakan pemetaan dan inventarisasi terkait pengelolaan BMN di lingkungannya masing-masing

Data historis target dan realisasi IKU persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio asset) pada KPKNL Kisaran tahun 2020 sampai dengan 2022 disajikan dalam tabel 3.17.

Tabel 3.17  
Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Asset) Tahun 2020 s.d. 2022

Uraian	2020	2021	2022
Target	34	28	50
Realisasi	37	38	70
Kinerja (%)	108,82%	135,71%	140,00%

Gambar 3.9  
Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Asset) Tahun 2020 dengan 2022



Isu Utama dan Implikasi:

Sampai dengan Triwulan IV capaian IKU Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja

BMN (Portofolio Aset) sebesar 140,00%. Untuk periode Tahun 2023, target yang ditetapkan untuk IKU ini akan lebih menantang sehingga diperlukan perencanaan yang matang.

Akar Masalah:

Seluruh rencana aksi yang direkomendasikan pada DKO periode triwulan III dan IV telah dilaksanakan, sehingga mampu mendukung capaian kinerja IKU Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) secara optimal, dapat diakselerasi menjadi 38 aset (melebihi target tahunan).

Selanjutnya, dalam rangka mencapai target tahun 2023 yang lebih menantang, perlu adanya perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik dengan satker terkait.

Tindakan yang telah dilaksanakan:

- a. Telah dilaksanakan koordinasi antara KPKNL Kisaran dan satuan kerja pada minggu pertama Triwulan III Tahun 2022.

Rekomendasi rencana aksi:

- a. Sosialisasi dan asistensi kepada satuan kerja.
- b. Pelaksanaan rapat koordinasi dengan satuan kerja..
- c. Menyusun rekomendasi hasil kajian portofolio aset

## 10. (5a-CP) Deviasi ketergunaan hasil penilaian

Tabel 3.18  
Rincian Target Dan Realisasi  
IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Deviasi ketergunaan hasil penilaian	19%	0%	200%

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN).

Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakanpemanfaatan/pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%.

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama.

Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Capaian IKU deviasi ketergunaan hasil penilaian tahun 2022 adalah 0,00% dari target 19% atau secara persentase sebesar 200,00%. Dalam pelaksanaannya masih dijumpai kendala yaitu satuan kerja menyampaikan nilai usulan yang lebih tinggi dari hasil penilaian yang telah dilakukan Tim Penilai KPKNL. Hal tersebut menimbulkan potensi adanya deviasi antara hasil penilaian dengan nilai persetujuan yang diterbitkan oleh Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara.

#### 11. (6a-CP) Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction

Tabel 3.19  
Rincian Target Dan Realisasi  
Persentase Pelaksanaan Lelang *E-Auction* Dan *E-Conventional Auction*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction Dan E-Conventional Auction	92%	100%	108,70%

*E-auction* adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan e-auction dapat menjangkau peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang.

Implementasi e-auction meliputi: 1) Pelaksanaan Lelang *e-Auction* adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang, dan 2) *E-Conventional Auction* adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan Virtual Account)

Implementasi *e-auction* mempunyai beberapa keunggulan antara lain: (i) menghemat waktu, biaya, dan tenaga karena tidak perlu kehadiran di lokasi lelang, (ii) memungkinkan peserta lelang dapat mengikuti lelang dimanapun dan kapanpun, (iii) menghilangkan intimidasi ataupun kerja sama dalam bentuk negatif, (iv) menghasilkan nilai transaksi lelang yang optimal bagi pemohon lelang sekaligus

meningkatkan PNPB lelang, dan (v) perbaikan citra layanan lelang di hadapan para pengguna layanan.

Target persentase implementasi *e-auction* terhadap total pelaksanaan lelang tahun 2022 sebesar 100 % dari total frekuensi lelang sebanyak 454 dan terealisasi sebesar 100% (seluruh lelang yang dilaksanakan menggunakan mekanisme *e-auction*).

Isu utama dan implikasi:

- a. Sampai dengan Triwulan IV capaian IKU persentase implementasi *e-auction* sebesar 100%.
- b. Untuk tahun depan diperlukan upaya-upaya strategis agar IKU ini dapat mencapai target *trajectory* maupun tahunan.

Akar masalah: Adanya potensi resistensi pemohon lelang terhadap *e-auction*

Tindakan yang telah dilakukan:

- a. Telah dilaksanakan sosialisasi lelang pada bulan November 2022;
- b. Telah dilaksanakan koordinasi dengan pemohon lelang pada setiap pengajuan permohonan lelang.

Rekomendasi rencana aksi:

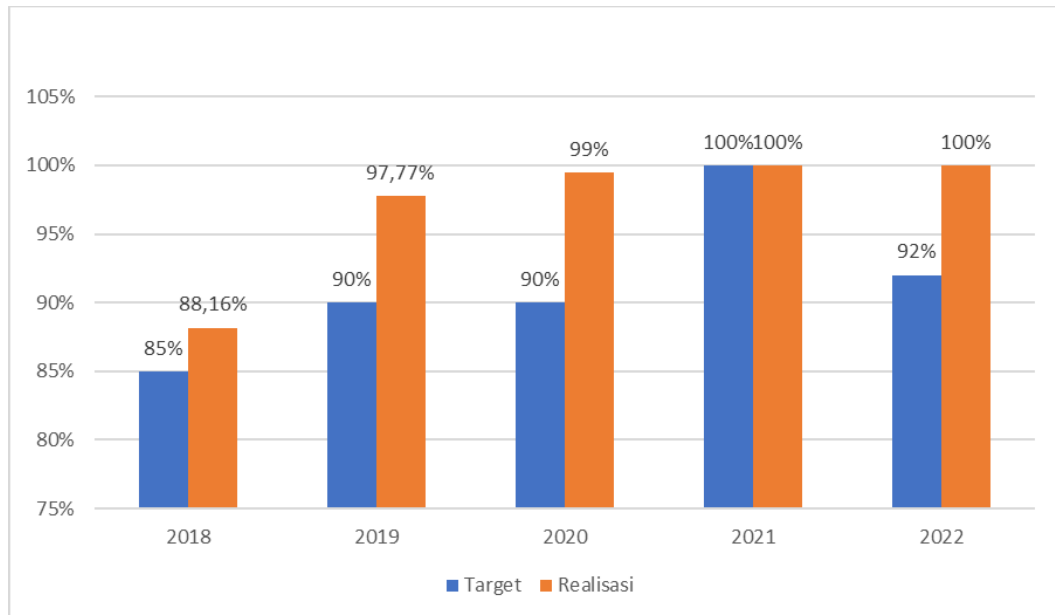
- a. Koordinasi dengan pemohon lelang
- b. Melaksanakan layanan konsultasi lelang secara intensif
- c. Sosialisasi dan edukasi kepada pemohon lelang maupun kepada masyarakat mengenai keuntungan mekanisme *e-auction*
- d. Publikasi lelang yang lebih maksimal untuk memasyarakatkan lelang DJKN sebagai salah satu alternatif jual beli yang transparan, komersil dan menguntungkan

Data historis target dan realisasi IKU Realisasi Persentase implementasi *e-auction* pada KPKNL Kisaran tahun 2018 sampai dengan 2022 disajikan dalam tabel dan diagram berikut ini:

Tabel 3.20  
Tabel perbandingan Realisasi Persentase implementasi *e-auction*  
Periode Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Target	85%	90%	90%	100%	92%
Realisasi	88,16%	97,77%	99,45%	100%	100%
Persentase (%)	103,72%	108,63%	110,5%	100%	108,70%

Gambar 3.10  
Diagram perbandingan Realisasi Persentase Implementasi *e-auction*  
Periode Tahun 2018-2022



## 12. (6b-CP) Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

Tabel 3.21  
Tabel Perbandingan Target dan Realisasi  
Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Deviasi data PNBP fungsional DJKN	10%	0,02%	199,85%

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Bidad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan MAP 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian).

Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN, diukur dari:

- 1) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi
- 2) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang\* dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir.

Target Deviasi PNBP dari Bidad PPN adalah 10%. Target Deviasi PNBP dari Bea Lelang adalah 10%, sehingga rata-rata target 10%.

Capaian IKU deviasi data PNBP fungsional DJKN tahun 2022 adalah 0,02% dari target 10% atau secara persentase sebesar 199,85%. Dalam pelaksanaannya masih dijumpai kendala yaitu perbedaan data antara pembukuan pada aplikasi dropbox lelang dengan aplikasi OM SPAN. Hal tersebut menimbulkan potensi adanya deviasi data PNBP fungsional DJKN yang berdampak pada tingkat akurasi penyajian data PNBP DJKN.

### 13 (7a-N) Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

Tabel 3.22  
Tabel Perbandingan Target dan Realisasi  
Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Tahun 2022

Indikator Kinerja				Target	Realisasi	Kinerja
Tingkat Efektifitas Edukasi dan Komunikasi				91	94,14	103,45%

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi digunakan untuk mengukur persepsi peserta atas 1) tingkat pemahaman, 2) kualitas materi, 3) kualitas fasilitator, dan 4) kualitas pendukung pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan. Proses edukasi dan komunikasi dilakukan dengan media seperti pelatihan, sosialisasi, atau workshop. IKU ini mengukur edukasi yang dilakukan oleh KPKNL Kisaran kepada pihak eksternal, seperti satuan kerja (K/L), pemohon lelang, pembeli lelang, masyarakat, dan lainnya. Kegiatan edukasi ini dilakukan paling tidak sebanyak dua kali dalam setahun (setiap semester satu kali).

Pembobotan atas empat indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- a. tingkat pemahaman peserta (bobot 70%), dengan pertimbangan fokus pelaksanaan edukasi adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta,
- b. kualitas materi (bobot 15%),
- c. kualitas fasilitator (bobot 10%), dan
- d. kualitas fasilitas pelatihan (bobot 5%).

Tahun 2022 target IKU tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi dengan indeks 91 dengan capaian sebesar 94,14 atau secara persentase adalah sebesar 103,45%. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini yaitu adanya perbedaan pemahaman peserta atas materi yang disampaikan oleh narasumber dan perbedaan kenyamanan selama pelaksanaan sosialisasi. Tindak lanjut yang diambil guna mengatasi kendala tersebut dengan memberikan penyajian materi yang menarik dan mudah dipahami oleh peserta dan dengan memanfaatkan ruang/gedung untuk sosialisasi yang nyaman dengan fasilitas yang lengkap.

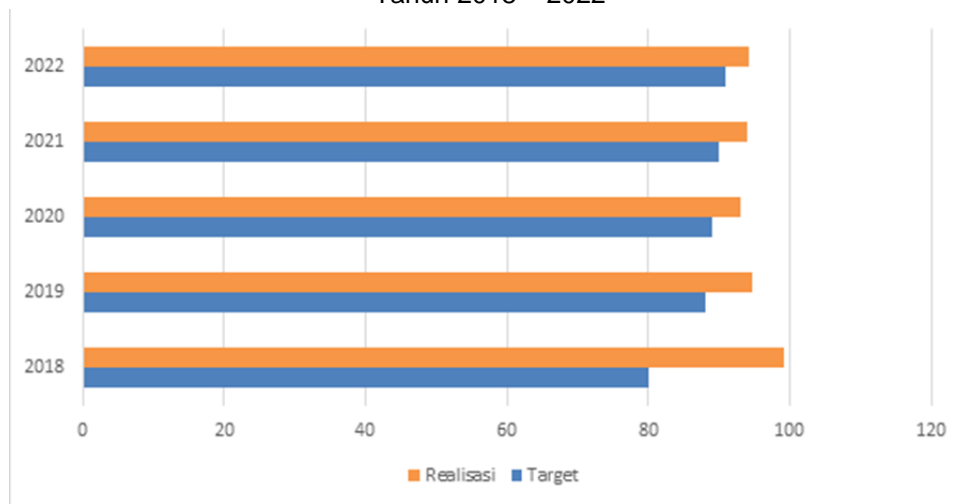
Langkah antisipatif yang diambil untuk periode mendatang dalam rangka mengantisipasi kendala yang mungkin timbul untuk pencapaian target IKU ini dengan memberikan penyajian materi yang menarik dan mudah dipahami oleh peserta, penambahan acara/game yang menarik sebagai bagian dari penyegaran kembali peserta sosialisasi, serta melakukan penyusunan *pre-post test* atau *post test* untuk mengukur pemahaman peserta sosialisasi.

Data historis target dan realisasi IKU Realisasi tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi pada KPKNL Kisaran tahun 2018 sampai dengan 2022 disajikan dalam tabel dan diagram berikut ini:

Tabel 3.23  
Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Periode Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Target	80	88	89	90	91
Realisasi	99,27	94,70	93,09	93,97	94,14
Persentase (%)	124,1%	107,6%	104,59%	104,41%	103,45%

Gambar 3.11  
Diagram Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Periode Tahun 2018 – 2022



Isu utama dan implikasi:

Kesalahan berulang terhadap prosedur ataupun dokumen yang dilakukan oleh KPKNL, hal ini harus diminimalisir agar prosedur dan pendokumentasian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Akar masalah:

Kesalahan-kesalahan pada prosedur ataupun dokumen yang dilakukan oleh KPKNL berdasarkan hasil verifikasi dan analisa laporan pada KPKNL Kisaran

Tindakan yang telah dilakukan:

Monitoring dan evaluasi ke satuan kerja telah dilaksanakan oleh Subbagian Umum, Seksi PKN, Seksi PN, Seksi Hukum dan Informasi, seksi Kepatuhan Internal dan para Pejabat Fungsional pada periode November – Desember 2022

Rekomendasi rencana aksi:

1. Koordinasi pada rencana kerja dengan seluruh subbagian umum dan seksi
2. Focus Group Discussion Kepatuhan Internal

#### 14. (8a-CP) Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara

Tabel 3.24  
Tabel Perbandingan Target dan Realisasi  
Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase tindak lanjut pengelolaan aset	85%	96,55%	113,59%

Tindak lanjut pengelolaan aset dilakukan dalam rangka menjamin terselenggaranya pengelolaan BMN yang baik. Untuk Pengelola Barang, tindak lanjut ini dilakukan meliputi kegiatan pemantauan dan investigasi terhadap pelaksanaan penggunaan BMN, pemanfaatan BMN, dan pemindahtanganan BMN.

Target yang ditetapkan IKU yaitu 85% dan realisasi yang berhasil dicapai 96,55% atau 113,59%.

Isu utama dan implikasi:

- a. Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan BMN pada K/L, dilakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN yang meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada K/L terutama terkait aspek utilisasi-nya.
- b. Difokuskan pada pemantauan utilisasi berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh DJKN selaku pengelola barang.
- c. Sampai dengan Triwulan IV capaian IKU persentase tindak lanjut pengelolaan kekayaan negara sebesar 113,59%.
- d. Capaian atas IKU persentase tindak lanjut pengelolaan asset telah melebihi target *trajectory* (tahunan)

- e. Dalam rangka menghadapi target tahun 2023 dan meningkatkan kualitas kepatuhan satuan kerja dalam pengelolaan aset perlu adanya rencana yang matang, peningkatan koordinasi dengan kantor pelayanan, dan bidang-bidang terkait

Akar masalah:

- Potensi satker tidak menindaklanjuti utilisasi atas asset yang telah diterbitkan DJKN
- Tingkat *awareness* satker untuk menindaklanjuti pengelolaan BMN masih rendah, dari sisi historis selama tahun 2022 terdapat satker yang lalai tidak menindaklanjuti dengan alasan nilai sewa terlalu tinggi dan ada juga yang membatalkan sewa kepada calon penyewa dengan alasan yang tiba-tiba pasca terbitnya persetujuan.

Tindakan yang telah dilakukan:

Seksi PKN telah melaksanakan FGD dan atau monev pengelolaan asset pada Triwulan IV Tahun 2022.

Rekomendasi rencana aksi:

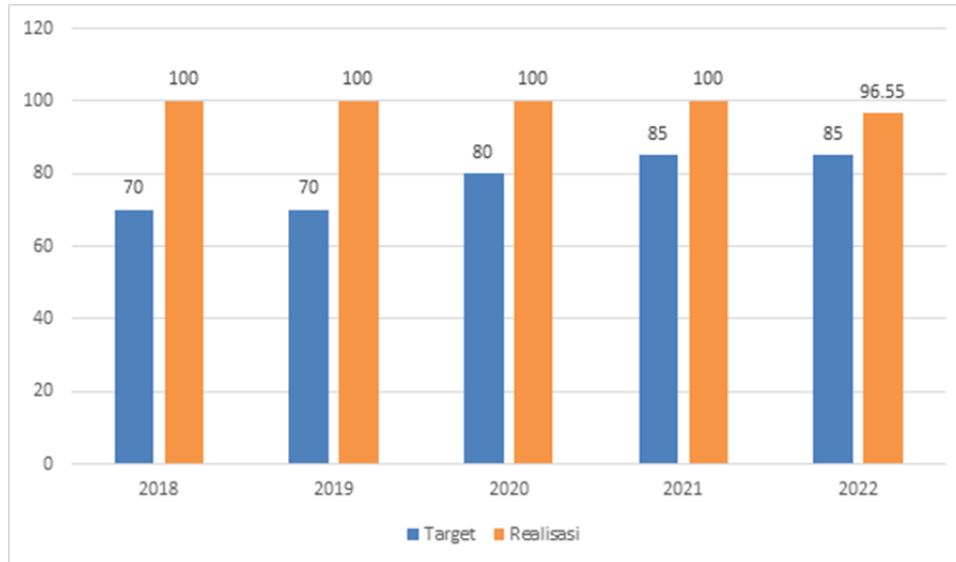
1. Menyampaikan Permintaan dan Penyampaian Laporan Wasdal
2. Melakukan koordinasi ke satker secara berkesinambungan sejak awal tahun 2023 antara lain sewaktu satker berkonsultasi terkait pengelolaan asetnya.
3. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN Kewenangan KPKNL

Data historis target dan realisasi IKU Realisasi Persentase Tindak Lanjut Pengelolaan Kekayaan Negara pada KPKNL Kisaran tahun 2018 sampai dengan 2022 disajikan dalam tabel dan diagram berikut ini:

Tabel 3.25  
Tabel Perbandingan Realisasi Persentase Tindak Lanjut Pengelolaan Kekayaan Negara Periode Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Target	70	70	80	85	85
Realisasi	100	100	100	100	96,55
Persentase (%)	142,86%	142,86%	125%	117,65%	113,59%

Gambar 3.12  
Diagram Perbandingan Realisasi Persentase Tindak Lanjut Pengelolaan Kekayaan Negara  
Periode Tahun 2018-2022



#### 15. (9a-N) Persentase pengembangan kompetensi pegawai

Tabel 3.26  
Tabel Perbandingan Target dan Realisasi  
Persentase pengembangan kompetensi pegawai tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase pengembangan kompetensi pegawai	75%	120%	160%

Pengembangan kompetensi bagi pegawai di lingkungan DJKN merupakan upaya pengembangan, pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap perilaku pegawai dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Pengukuran dilakukan dengan pemenuhan standard kompetensi teknis (kesesuaian antara penempatan/posisi pegawai saat ini dengan kompetensi/pelatihan pegawai yang dimiliki) serta memperhitungkan pemenuhan standar jamlat kegiatan program pengembangan kompetensi (Teknis/Manajerial) yang diikuti pegawai selama tahun 2022.

Pegawai yang memenuhi standard kompetensi teknis ditunjukkan dengan kesesuaian antara Tugas/Fungsi Jabatan dengan pendidikan/pelatihan yang telah diikuti. Pendidikan/pelatihan tersebut meliputi pendidikan gelar Diploma I, Diploma III, S1/ DIV, atau gelar akademik lainnya; maupun Program pengembangan kompetensi pegawai sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-28/MK.1/2017 yang terkait bidang teknis tempat pegawai tersebut bekerja (Unit Eselon IV).

Pegawai yang memenuhi Standar Jamlat Program Pengembangan Pegawai adalah

Pegawai yang telah mengikuti kegiatan program pengembangan kompetensi sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-28/MK,1/2017 selama tahun 2019 dan dengan jumlah minimal jamlat yang telah di tentukan (akumulatif).

Pengembangan Kompetensi dimaksud tidak terbatas hanya pada bidang teknis pegawai tersebut. Program pengembangan kompetensi pegawai sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-28/MK.1/2017 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi di Lingkungan Kementerian Keuangan meliputi:

I. Pengembangan Kompetensi Klasikal (Bimbingan Teknis, Kursus/Short-Course, Pelatihan, Penataran, Workshop, Sosialisasi, Seminar/Konferensi/Lokakarya, Sharing Session, Sarasehan)

II. Pengembangan Kompetensi Non Klasikal (Outbound, Studi Banding/ Benchmarking, Belajar mandiri (self Study)/Membaca buku/Mempelajari Aturan, Pelatihan Jarak Jauh/E-learning, Bimbingan di tempat kerja (Coaching atau Mentoring), Secondment/Penugasan untuk mempelajari atau mengevaluasi proses bisnis di suatu unit kerja/Detasering/Praktik Kerja Lapangan (PKL), Pertukaran Pegawai, Penugasan Sementara menduduki jabatan lain di luar jabatannya saat ini tanpa meninggalkan jabatan/tugas dan fungsi utamanya (contoh : menjadi Plh., Plt.), Taskforce/Project Assignment (Penugasan dalam suatu tim untuk menangani tugas atau proyek tertentu/penugasan terkait program prioritas), Mengajar/menjadi narasumber/Memberikan ilmu pengetahuan atau bimbingan pada pihak lain, Job Shadowing, Ekstrakurikuler (penugasan dalam aktivitas semi non-formal, misalnya menjadi ketua pekan olahraga instansi, koordinator acara peringatan hari keuangan, dan lainnya).

Pemenuhan standar kompetensi teknis dan standar minimal jamlat kegiatan pengembangan kompetensi pegawai minimum 24 jamlat (akumulasi).

Keikutsertaan pada kegiatan pengembangan kompetensi pegawai dibuktikan melalui:

- a. Sertifikat
- b. Surat keputusan/surat perintah yang mencantumkan jangka waktu pelaksanaan
- c. Surat keterangan melaksanakan pengembangan kompetensi baik secara individual maupun kelompok diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian, dengan ketentuan:
  - 1) pada kantor pusat diterbitkan paling rendah oleh pejabat eselon II;
  - 2) pada kantor vertikal diterbitkan oleh Kepala Kantor.

Pada tahun 2022, di lingkungan KPKNL Kisaran persentase pengembangan kompetensi pegawai mencapai 120% dari target kinerja 75% atau dengan capaian 160%. Meskipun

telah mencapai target kinerja, namun masih terdapat area-area yang perlu mendapatkan perhatian khususnya dalam menghadapi tantangan target di tahun 2022, antara lain :

- a. Pegawai tidak dapat/berhalangan mengikuti diklat yang sudah ditetapkan/ditetujui;
- b. Diklat yang diikuti tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab/*hard competency* di bidangnya;
- c. Pembatalan beberapa diklat karena adanya penghematan anggaran.

Atas hal-hal tersebut telah disusun langkah antisipasi guna menghindari kendala:

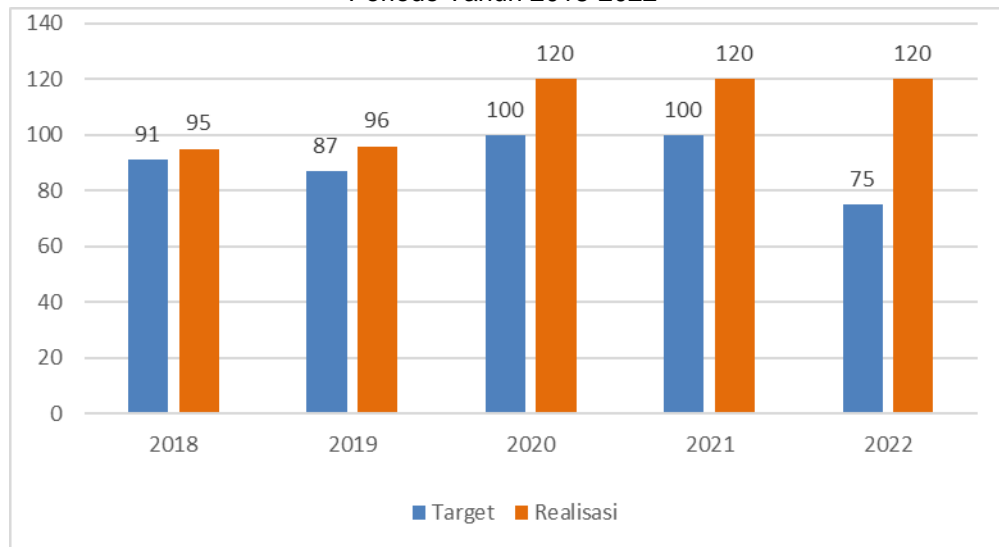
- a. Mengusulkan peserta diklat sesuai dengan *hard competency* masing-masing diseksi terkait;
- b. Memberikan pemahaman secara tertulis kepada setiap pegawai agar dapat memilih diklat yang akan diikuti sesuai *hard competency* di bidangnya;
- c. Rotasi internal pelaksana;

Data historis target dan realisasi IKU Realisasi Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai pada KPKNL Kisaran tahun 2018 sampai dengan 2022 disajikan dalam tabel dan diagram berikut ini:

Tabel 3.27  
Tabel Perbandingan Target dan Realisasi  
Persentase pengembangan kompetensi pegawai  
Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Target	91	87	100	100	75
Realisasi	95	96	120	120	120
Persentase (%)	104,4%	110,34%	120	120	160

Gambar 3.13  
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai  
Periode Tahun 2018-2022



## 16. (10a-N) Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK

Tabel 3.28  
Tabel Perbandingan Target dan Realisasi  
Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK	75	92,72	123,63%

Dalam rangka mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang terdapat pada road map reformasi birokrasi 2020-2024, terutama terkait birokrasi yang bersih dan akuntabel, dan pelayanan publik yang prima, perlu peningkatan kualitas pembangunan zona integritas pada unit kerja/satuan kerja pada instansi pemerintah.

Berdasarkan PermenPAN-RB 52/2014 sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019 dan PermenPAN-RB 20/12021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dengan nilai komponen

pengungkit minimal yang ambang batas penilaian, dengan ketentuan:

- a. total nilai pengungkit dan hasil minimal 75,00 dengan minimal nilai pengungkit 40 untuk Menuju WBK dan minimal 85,00 dengan minimal nilai pengungkit 48 untuk Menuju WBBM 75. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% pada semua area pengungkit untuk predikat Menuju WBK dan bobot nilai per area pengungkit minimal 75% pada semua area pengungkit untuk predikat Menuju WBBM;
- b. nilai komponen hasil “Birokrasi yang bersih dan akuntabel” minimal 18,25 untuk Menuju WBK dan 19,50 untuk menuju WBBM dengan ketentuan nilai sub komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal 15,75 atau minimal skor survei 3,60 untuk Menuju WBK dan WBBM, serta nilai sub komponen “kinerja lebih baik” minimal 2,50 untuk Menuju WBK dan 3,75 untuk Menuju WBBM;
- c. Nilai komponen hasil “Pelayanan publik yang prima” minimal 14,00 atau skor survei minimal 3,20 untuk unit kerja/satuan kerja yang diajukan berpredikat Menuju WBK dan minimal 15,75 atau skor survei minimal 3,60 untuk unit kerja/satuan kerja yang diajukan berpredikat Menuju WBBM.

## 17. (10b-N) Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja

Tabel 3.29  
Tabel Perbandingan Target dan Realisasi  
Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Nilai reviu pengelolaan kinerja	80	99,20	124,00%

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan system penilaian kinerja sebagai bagian dari system pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Sejak tahun 2007, Kementerian Keuangan telah menetapkan penggunaan metode BSC dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah.

Review pengelolaan kinerja berbasis BSC dilaksanakan oleh Kanwil DJKN dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi penyusunan perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi, dan intensitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	25%
2	Pelaksanaan/eksekusi Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	30%
3	Monitoring dan Evaluasi Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	30%
4	Intensitas Edukasi Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	15%

IKU ini bertujuan untuk mengetahui seberapa perkembangan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan DJKN serta untuk menghasilkan umpan balik yang positif bagi perbaikan kualitas pengelolaan kinerja di masa mendatang.

Isu utama dan implikasi:

1. Pengelolaan kinerja di KPKNL Kisaran harus dilaksanakan secara berkualitas
2. Pengelolaan kinerja di KPKNL Kisaran harus menghasilkan umpan balik yang positif bagi perbaikan kualitas pengelolaan kinerja di masa mendatang.
3. Pada tahun 2022 target meningkat dari tahun sebelumnya (tahun 2020 dengan target 75) dan diindikasikan bahwa trend target di tahun mendatang akan terus meningkat dan lebih menantang, oleh karena itu diperlukan adanya langkah- langkah untuk mendukung pencapaian IKU tersebut.

Akar masalah:

- Masih rendahnya awareness pegawai KPKNL Kisaran terkait pengelolaan kinerja dan masih terdapat anggapan sebagian besar pegawai bahwa pengelolaan kinerja sepenuhnya merupakan tugas seksi KI. Namun sesuai KMK 467/KNK.01/2014, pengelolaan kinerja yang baik merupakan tanggung jawab seluruh pegawai dimana terdapat kegiatan yang harus dilakukan sendiri oleh pegawai karena menyangkut hak-hak kepegawaian pegawai itu sendiri.
- Potensi pegawai yang tidak memahami IKU dan KK masing-masing
- Penyusunan manual IKU yang tidak tertib
- Kurang maksimalnya edukasi tentang pengelolaan kinerja di subbagian umum dan seksi di KPKNL Kisaran.

Tindakan yang telah dilakukan:

1. Menyediakan layanan konsultasi penyusunan IKU
2. Menyusun brosur kinerja KPKNL Kisaran pada Bulan Januari 2022
3. Melaksanakan bimtek tentang pengelolaan kinerja ke seluruh seksi dan subbagian umum pada Minggu III Bulan Oktober 2022

Rekomendasi rencana aksi:

1. Melaksanakan koordinasi kepada Bidang KIH Kanwil DJKN Sumatera Utara selaku SMKO guna megentahui substansi dan dokumen pendukung dari review yang akan

dilakukan

2. Menyusun rencana kerja yang memuat kegiatan dari aspek penilaian pengelolaan kinerja
3. Melakukan internalisasi pengelolaan kinerja secara berkala (triwulanan)
4. Melakukan koordinasi dengan seksi Hukum dan Informasi dalam rangka publikasi terkait informasi pengelolaan kinerja
5. Menyusun bahan edukasi berupa video, infografis, poster yang eye catching dan menarik.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan kinerja yang telah disepakati bersama dalam DKO sehingga awareness dan kepatuhan para pegawai dapat ditingkatkan.

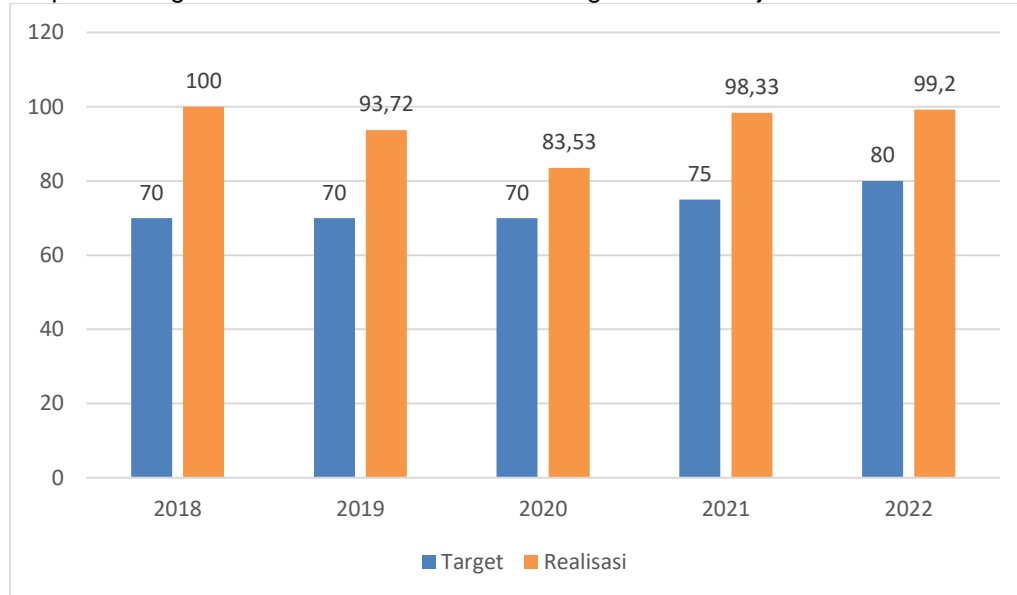
Data historis target dan realisasi IKU Realisasi Nilai Hasil Reviu Pengelolaan Kinerja pada KPKNL Kisaran tahun 2018 sampai dengan 2022 disajikan dalam tabel dan diagram berikut ini:

Tabel 3.30  
Tabel perbandingan Realisasi Nilai Hasil Reviu Pengelolaan Kinerja  
Periode Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Target	70	70	70	75	80
Realisasi	100	93,72	83,53	98,33	99,20
Persentase (%)	142,86%	124,96%	120%	131,11%	124%

Gambar 3.14

Diagram perbandingan Realisasi Nilai Hasil Reviu Pengelolaan Kinerja Periode Tahun 2018-2022



### 18. (10c-N) Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator

Tabel 3.31

Tabel perbandingan target dan realisasi

Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator Periode Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator	90	99,95	111,06%

Tingkat efektivitas FGD Pejabat Administrator merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keaktifan Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD kepada pegawai di lingkungannya termasuk mengukur mengenai kecepatan pelaksanaan FGD dan feedback peserta (pegawai di bawah koordinasi Pejabat Administrator terkait) terhadap kegiatan FGD yang dilaksanakan.

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO). Kegiatan FGD dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan terkait Pelaksanaan Forum Group Discussion. Fokus materi FGD akan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal melalui surat Kepala Biro SDM atas nama Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

Parameter yang diukur berdasarkan dua aspek yaitu:

- 1) kecepatan (seberapa cepat materi FGD disampaikan kepada pegawai sejak pelaksanaan Pra-FGD).
- 2) feedback peserta yang terdiri dari content, delivery, dan contribution.

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui:

- 1) Data pelaksanaan FGD yang ada di e-performance masing-masing Pejabat Administrator, dan
- 2) kuesioner yang dikordinir oleh Setjen (CTO).

Aspek yang diukur dengan kuesioner (feedback) dari peserta (bawahan) yaitu:

1. Content (topik materi dan pesan yang disampaikan);
2. Delivery (cara penyampaian materi oleh Pejabat Administrator);
3. Contribution (dampak kegiatan FGD terhadap peningkatan kapasitas pegawai)..

Target Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator tahun 2022 sebesar 90. Dari kuesioner yang disebar, didapatkan nilai indeks sebesar 99,95, sehingga secara persentase capaian atas IKU tersebut adalah 111,06%.

Isu utama dan implikasi:

1. Sampai dengan Triwulan IV capaian IKU Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator sebesar 111,06%.
2. Untuk tahun depan diperlukan upaya-upaya strategis agar IKU ini dapat mencapai target trajectory maupun tahunan

Akar masalah: Tingkat pemahaman peserta yang berbeda-beda

Tindakan yang telah dilakukan:

1. Mendistribusikan bahan dokumen FGD sebelum pelaksanaan agar peserta bisa mempelajari isu yang akan dipaparkan
2. Membuka ruang diskusi setelah kegiatan FGD
3. Melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab terkait pencapaian target IKU dengan Subbag Umum secara periodisasi.
4. Menyusun timeline pelaksanaan FGD Pejabat Administrator

Rekomendasi rencana aksi:

1. Menyusun timeline pelaksanaan FGD Pejabat Administrator
2. Membuka ruang diskusi secara berkesinambungan

## 19. (11a-CP) Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Tabel 3.32  
Rincian Target Dan Realisasi  
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	94,19%	95,5%	98,63%

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi.

Adapun tujuan strategis dari IKU ini adalah untuk memberikan panduan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan agar dalam melakukan perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berpedoman pada tata cara perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) nomor SE-2/MK.1/2019 tanggal 11 Maret 2019.

Pada tahun 2022, KPKNL Kisaran mengelola anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.33  
Rincian Jenis Belanja dan Anggaran Tahun 2022

Keterangan	Jenis Belanja			Total
	Pegawai	Barang	Modal	
Pagu	Rp -	Rp 1.710.010.000	Rp -	Rp 1.710.010.000
Realisasi	Rp -	Rp 1.580.702.154	Rp -	Rp 1.580.702.154
Persentase	0,00%	92,44%	0,00%	92,44%
Sisa	Rp -	Rp 129.307.846	Rp -	Rp 129.307.846

Dengan pengelolaan dana tersebut, KPKNL Kisaran mampu mencapai output dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.34  
Rincian Target dan Realisasi Capaian Output Tahun 2022

Struktur	Uraian	Target Sesuai DIPA	Realisasi
<b>Program</b>	<b>Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko</b>	<b>1.371</b>	<b>1.774</b>
Kegiatan	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	50	217
KRO	Komunikasi Publik	50	217
RO	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	25	99
RO	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang	25	118
Kegiatan	Pengelolaan Aset	1.321	1.557
KRO	Peraturan lainnya	427	567
RO	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	50	84
RO	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	17	16
RO	Risalah Lelang	350	454
RO	Risalah Lelang Sukarela UMKM (PU)	10	13
KRO	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	892	988
RO	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)	629	686
RO	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset dan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	50	70
	Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	205	205
RO	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	1	2
RO	Rekomendasi Hasil Penilaian	1	1
RO	Penggalian Potensi Lelang	6	24
KRO	Pengelolaan Aset BUN	2	2
RO	Pengelolaan Aset BUN	2	2
<b>Program</b>	<b>Program Dukungan Manajemen Internal</b>	<b>55</b>	<b>71</b>

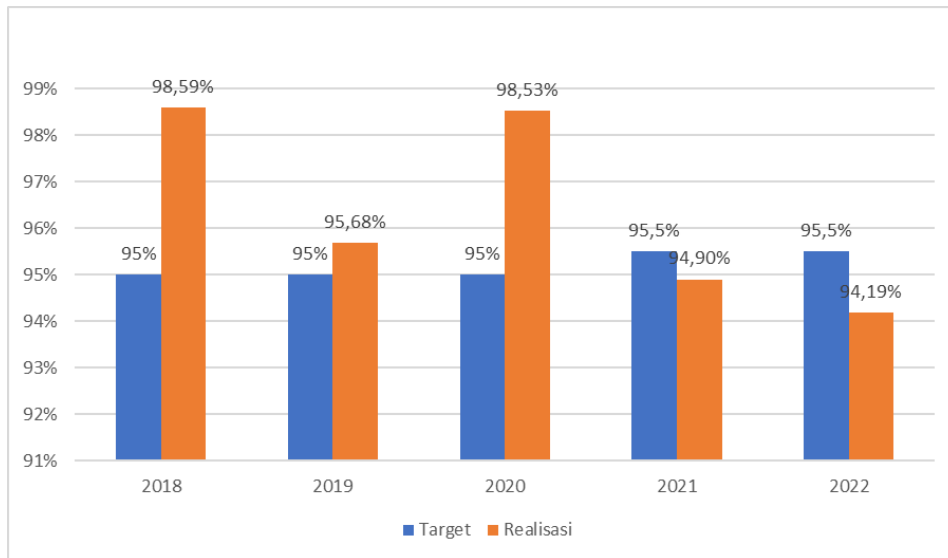
Kegiatan	Legislasi dan Litigasi	20	30
KRO	Layanan Bantuan Hukum	20	29,65
RO	Advokasi Hukum	20	29,65
Kegiatan	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	1	19
KRO	Komunikasi Publik	1	19
RO	Kehumasan	1	19
Kegiatan	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	5	5
KRO	Layanan Dukungan Manajemen Internal	24	12
RO	Kerumahtanggaan	12	12
RO	Layanan Perkantoran	12	12
KRO	Layanan Pengawasan Internal	5	5
RO	Rekomendasi Kepatuhan Internal	5	5

Berdasarkan data realisasi penyerapan anggaran yang merujuk pada hasil monitoring dan evaluasi setelah dilakukan revisi terhadap anggaran per jenis belanja pada KPKNL Kisaran tahun 2022 sebagaimana pada table 3.33, data historis target dan realisasi IKU Realisasi Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada KPKNL Kisaran tahun 2018 sampai dengan 2022 disajikan dalam tabel dan diagram berikut ini:

Tabel 3.35  
Tabel perbandingan Realisasi Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran  
Periode Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Target	95%	95%	95%	95,5%	95,5%
Realisasi	98,59%	95,68%	98,53%	94,90%	94,19%
Persentase (%)	103,78%	100,72%	103,72%	99,37%	98,63%

Diagram Perbandingan Realisasi realisasi penyerapan DIPA Tahun 2018 - 2022



Isu Utama: Adanya Kontradiksi antara indikator Penyerapan Anggaran dan Efisiensi pada perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Adapun akar masalah yang dihadapi dalam pencapaian IKU tersebut diantaranya:

- a. Adanya penyimpangan antara Rencana Penarikan Dana yang telah disusun dengan realisasi anggaran. Hal ini terjadi karena memprioritaskan indikator penyerapan anggaran.
- b. Rendahnya pengelolaan UP dan TUP karena banyaknya kegiatan yang dapat dilakukan melalui pembayaran langsung (SPM LS)

Terhadap kendala-kendala tersebut, rencana tindakan yang dilaksanakan antara lain:

- a. Menyusun RPD secara matang dengan menyesuaikan target penyerapan anggaran serta berkomitmen mematuhi RPD yang telah disusun
- b. Memperhitungkan penggunaan UP agar memenuhi target yang telah ditentukan tiap bulannya.

Upaya-upaya lain yang telah dilakukan:

- a. Membuat Nota Dinas permintaan rencana kegiatan kepada Seksi dan Jabatan Fungsional terkait serta rencana penyerapan anggaran tiap bulannya.
- b. Menyampaikan SPM GUP tepat waktu dan sesuai proporsinya.
- c. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran kepada seksi teknis.

## 20. (11b-CP) Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2022 berfokus pada dukungan pencapaian atas Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang diukur oleh DJKN dan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang diukur oleh LKPP. IKU diukur dari 2 komponen yakni persentase dukungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dan persentase dukungan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP).

Rincian target dan realisasi terhadap IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan dijabarkan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3.36  
Rincian Target Dan Realisasi  
Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan Anggaran Tahun 2022

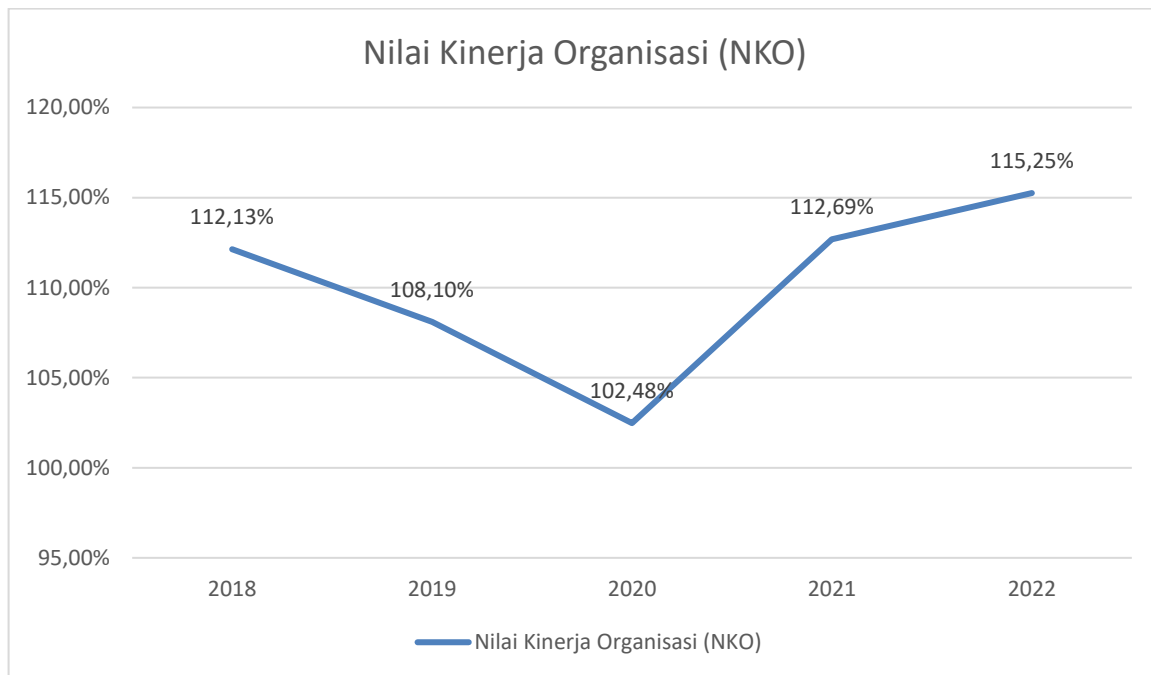
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan Anggaran	100%	185%	185%

KPKNL Kisaran telah melakukan upaya dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan pengelolaan BMN dan Pengadaan hal ini dilihat dari pencapaian target IKU tersebut dengan dukungan penguatan fungsi pengelolaan keuangan dan BMN dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi di lingkungan KPKNL Kisaran.

## BAB IV PENUTUP

Secara keseluruhan capaian kinerja atas 11 (sebelas) Sasaran Strategis yang dijabarkan dalam 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Kemenkeu *Three* KPKNL Kisaran Tahun 2021 dapat tercapai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 115,25%.

Gambar 4.1  
Grafik Perbandingan NKO KPKNL Kisaran Tahun 2018 s.d. 2022



Grafik pada gambar 4.1 mengilustrasikan perkembangan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Kisaran dalam kurun tahun 2018 sampai dengan 2022. Selama kurun waktu 2018 s.d 2020, dari sisi tren NKO mengalami penurunan, namun di tahun 2021 sampai dengan 2022 NKO mengalami kenaikan yang signifikan. Selain itu, dari sisi target yang dibebankan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dan dari sisi sifat target juga lebih *challenging*. Dalam hal ini, KPKNL Kisaran selain selalu berupaya meningkatkan kinerja organisasi tidak hanya dari sisikuantitas, namun juga upaya mewujudkan peningkatan kinerja organisasi dari sisi kualitas pekerjaan dalam rangka mewujudkan pelayanan public dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Dalam upaya pencapaian target kinerja pada tahun 2022, KPKNL Kisaran menghadapi permasalahan dan kendala/hambatan. Namun, kendala dan permasalahan tersebut masih dapat diatasi dengan dilakukannya penanganan segera terhadap permasalahan yang ada, sehingga target yang telah ditetapkan secara umum dapat dicapai.

Sebagai unit vertikal DJKN, KPKNL Kisaran selalu berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dengan menghadapi permasalahan dan kendala/hambatan. Dalam rangka menghadapi tantangan, hambatan dan permasalahan guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2023, masing-masing seksi/subbagian umum telah menyusun *mapping* dan *action plan*, dengan rincian sebagai berikut:

A. Subbagian Umum

1. Optimalisasi analisis beban kerja dalam rangka pemetaan ketersediaan pegawai dan beban kerja masing-masing seksi/subbag umum
2. Menugaskan pegawai sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi serta memperhatikan pemenuhan kompetensi pegawai;
3. Percepatan pelaksanaan program kegiatan segera setelah revisi anggaran disahkan;
4. Penajaman program dan kegiatan kerja;
5. Pemantauan secara berkala atas pelaksanaan paket pengadaan agar selesai tepat pada waktunya dan sesuai dengan kontrak.

B. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

1. Penggalan potensi nilai kekayaan negara yang diutilisasi dan potensi manfaat ekonomi melalui pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN;
2. Sosialisasi kepada satuan kerja terkait peraturan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, pengawasan dan pengendalian, pengamanan, penatausahaan, dan rekonsiliasi BMN;
3. Meningkatkan pelaksanaan frekuensi maupun kualitas *knowledge sharing* dan *focus group discussion* terkait pengelolaan kekayaan negara;
4. Meningkatkan penyediaan layanan konsultasi pengelolaan barang milik negara, dan bimbingan teknis aplikasi SIMAN, SIMANTAP dan SIMAK BMN.

C. Seksi Piutang Negara

1. Penggalan Potensi Piutang Negara dengan prioritas piutang secara lebih intensif;
2. Penyamaan persepsi mengenai kelengkapan dokumen dan tata cara penyerahan;
3. Pembinaan kualitas SDM terkait administrasi pengurusan piutang negara;
4. Perbantuan SDM secara langsung berupa Penatausahaan BKPN serta Perbantuan/pendampingan dalam upaya penagihan langsung dan asistensi pengurusan piutang negara.

D. Seksi Hukum dan Informasi

1. Peningkatan kualitas pemberian pendapat hukum dan penanganan perkara.
2. Peningkatan penyediaan dan pemberian informasi public
3. Peningkatan kualitas dan percepatan layanan kebendaharaan penerimaan

E. Seksi Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi

1. Mengadakan *Forum Group Discussion* terkait manajemen risiko KPKNL Kisaran;
2. Mengadakan forum kinerja dilingkup KPKNL;
3. Peningkatan kegiatan pengendalian internal terhadap seluruh layanan KPKNL;
4. Peningkatan pemantauan kode etik pegawai dan Area Pelayanan Terpadu KPKNL;
5. Melaksanakan survey kepuasan pengguna layanan dan efektivitas pelaksanaan tugas pada KPKNL sebagai sarana evaluasi peningkatan layanan KPKNL
6. Melaksanakan konfirmasi kepada para stakeholder dalam rangka mitigasi risiko fraud

#### F. Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah

1. Peningkatan kapasitas Penilai yang dilakukan secara berkala;
2. Koordinasi bersama *stakeholders* potensial;
3. Ekstensifikasi potensi SDM di bidang penilaian;
4. Pembebanan hasil *quality assurance* ke dalam IKU individu Penilai;
5. Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK dengan verifikasi dan menyusun DKPB.

#### G. Jabatan Fungsional Pelelang

1. Melaksanakan penggalian potensi lelang dan sosialisasi lelang;
2. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan lelang oleh pejabat lelang kelas I dilingkup KPKNL Kisaran;
3. Membangun database bidang lelang;
4. Pelaksanaan *in-house training* penyusunan laporan di seksi lelang;
5. Koordinasi dengan Bidang Lelang Kanwil DJKN Sumatera Utara dalam rangka pemeriksaan risalah lelang dan pemusnahan kertas sekuriti di KPKNL;
6. Pelaksanaan rapat kinerja setiap semester di seksi lelang;
7. Pengendalian dan pemantauan pelaksanaan lelang *via e-auction*.

Seluruh informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja KPKNL Kisaran tahun 2022 merupakan wujud pertanggungjawaban keberhasilan kinerja KPKNL Kisaran atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah diberikan kepada KPKNL Kisaran selama tahun 2022.

Laporan Kinerja KPKNL Kisaran tahun 2022 diharapkan mampu menjadi bahan refleksi, koreksi, evaluasi sekaligus motivasi untuk memperbaiki area tugas fungsi yang belum optimal serta peningkatan area tugas fungsi yang selama ini telah baik dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja KPKNL Kisaran di periode yang akan datang, sehingga peran dan keberadaan KPKNL Kisaran dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui penyediaan layanan berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

Kontrak Kinerja,  
Addendum Kontrak Kinerja  
& Pengukuran Kinerja  
KPKNL Kisaran 2022



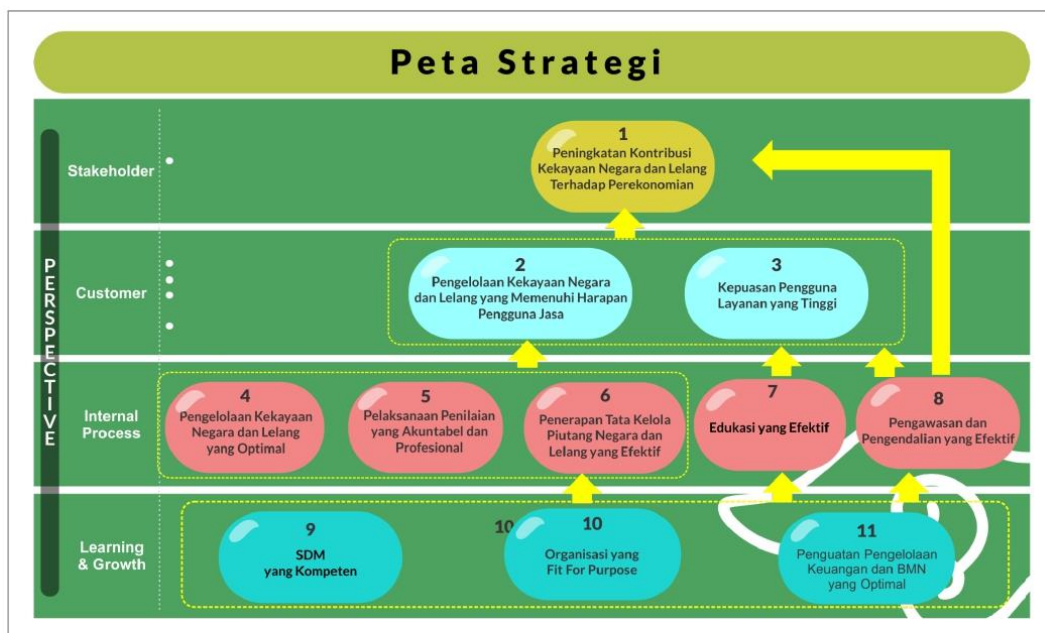
**KONTRAK KINERJA  
NOMOR: 9/KN.14/2022  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN  
LELANG KISARAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2022**

**Pernyataan Kesanggupan**

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kisanran, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Peta Strategi**



9

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2022



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP Persentase Produktivitas Lelang	36%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,82
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
		4b-CP Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%
		4c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
		4d-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6a-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
		6b-CP Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%
7	Edukasi yang Efektif	7a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	91
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	8a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%
9	SDM yang Kompeten	9a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
10	Organisasi yang Fit For Purpose	10a-N Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK	75
		10b-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2022



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		10c-N Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	11a-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%
		11b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%

#### Kegiatan

Kegiatan	Anggaran
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp 8.331.000
2. Pengelolaan Aset	Rp 163.308.000
3. Legislasi dan Litigasi	Rp 8.752.000
4. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 1.505.805.000
5. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp 10.078.000
6. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp 8.752.000

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara



Ditandatangani Secara Elektronik  
Tedy Syandriadi

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kisaran



Ditandatangani Secara Elektronik  
Agus Budianta

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2022



**RINCIAN TARGET KINERJA  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2022**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	20%	25%	25%	30%	36%	36%	36%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL						4,82	4,82
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK		50%	50%	55%	55%	65%	65%
4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	20%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
6a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
6b-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
7	Edukasi yang Efektif							

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2022



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi		91	91		91	91	91
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara		40%	40%		40%	85%	85%
9	SDM yang Kompeten							
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
10	Organisasi yang Fit For Purpose							
10a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK						75	75
10b-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja						80	80
10c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	90	90	90	90	90	90
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							
11a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	95,5 %	95,5 %	95,5 %	95,5 %	95,5%	95,5%
11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	10%	50%	50%	85%	85%	100%	100%

Pejabat/Pegawai/PNS yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Agus Budianta

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2022



**INISIATIF STRATEGIS  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2022**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Anggaran
				Kegiatan	Output			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian/ Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN	Jumlah aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat	Q1: Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Daftar Aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Q1 s.d. Q4	Bidang/Seksi PKN	-
				Q2: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q2: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q3: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q3: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q4: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Q4: Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan			

Pejabat/Pegawai/PNS yang dinilai,



Diandatangani Secara Elektronik  
Agus Budianta

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2022



## Sasaran Kerja Pegawai

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN

1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Agus Budianta	NAMA	Tedy Syandriadi
NIP	197608031999031002	NIP	196508291991031001
PANGKAT/GOL RUANG	Pembina, IV/a	PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kisaran	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara

NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. KINERJA UTAMA</b>			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
2	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	Persentase Produktivitas Lelang	36%
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
5	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,82
6	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
7	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%
8	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
9	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
10	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%
11	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
12	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	10%

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2022



13	Edukasi yang Efektif	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	91
14	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%
15	SDM yang Kompeten	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
16	Organisasi yang Fit For Purpose	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK	75
17	Organisasi yang Fit For Purpose	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80
18	Organisasi yang Fit For Purpose	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90
19	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%
20	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%

#### B. KINERJA TAMBAHAN

Pegawai yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Agus Budianta  
NIP 197608031999031002

Kisaran, 31 Januari 2022

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Tedy Syandriadi  
NIP 196508291991031001

*Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2022*



## Pengukuran Kinerja Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Kisaran Tahun 2022

Kode	IKU	Target Q4	Realisasi Q4	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	<b>Stakeholder Perspective(25%)</b>				30,00%	
1	<b>Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian</b>				120,00%	
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	136,32%	136,32%	120,00%	hijau
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	36%	46,26%	128,49%	120,00%	hijau
	<b>Customer Perspective(15%)</b>				16,66%	
2	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa</b>				120,00%	
2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	152,32%	152,32%	120,00%	hijau
2b-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	100%	1070,25%	1070,25%	120,00%	hijau
3	<b>Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi</b>				102,07%	
3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4,82	4,92	102,07%	102,07%	hijau
	<b>Internal Process Perspective (30%)</b>				33,97%	
4	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal</b>				114,72%	
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%	73,43%	112,962%	112,96%	hijau
4b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%	109,06%	109,06%	109,06%	hijau
4c-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPn	100%	160,00%	160,00%	120,00%	hijau
4d-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%	140,00%	140,00%	120,00%	hijau
5	<b>Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional</b>				120,00%	
5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	19%	0,00%	200,00%	120,00%	hijau
6	<b>Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif</b>				114,35%	
6a-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92%	100,00%	108,70%	108,70%	hijau
6b-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	10%	0,02%	199,85%	120,00%	hijau
7	<b>Edukasi yang efektif</b>				103,45%	
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	91	94,14	103,45%	103,45%	hijau
8	<b>Pengawasan dan pengendalian yang efektif</b>				113,59%	
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%	96,55%	113,59%	113,59%	hijau
	<b>Learning &amp; Growth Perspective (30%)</b>				34,63%	
9	<b>SDM yang kompeten</b>				120,00%	
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	75%	120,00%	160,00%	120,00%	hijau
10	<b>Organisasi yang fit for purpose</b>				117,02%	
10a-N	Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK	75	92,72	123,63%	120,00%	hijau
10b-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80	99,20	124,00%	120,00%	hijau
10c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	99,95	111,06%	111,06%	hijau
11	<b>Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal</b>				109,31%	
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	94,19%	98,63%	98,63%	kuning
11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100,0%	185,00%	185,00%	120,00%	hijau
<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO)</b>					<b>115,25%</b>	<b>hijau</b>

## Dokumentasi Kegiatan KPKNL Kisaran

Singeri dan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja KPKNL Kisaran  
Terkait Pengelolaan Kekayaan Negara, Pelaksanaan Penilaian, dan Pelaksanaan Lelang



Pemda Kabupaten Labuhanbatu Selatan



Pemda Kota Tanjung Balai



Pemda Kabupaten Labuhanbatu



Pemda Kabupaten Batubara



Pemda Kabupaten Labuhanbatu Utara



Pemda Kabupaten Asahan

KPKNL Kisaran melaksanakan rapat koordinasi dengan Rumah Kreatif UMKM Asahan sebagai upaya KPKNL Kisaran dalam membantu para pelaku UMKM di Wilayah Kab.Asahan untuk memperluas cakupan produk UMKM khususnya para pelaku UMKM di Kab Asahan.



KPKNL Kisaran melakukan koordinasi dengan Gerakan Ekonomi Kreatif (Gekraf) Asahan terkait UMKM di Kab. Asahan

Koordinasi Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro Tahun 2022 di Dinas Koperasi dan Perdagangan Kab. Asahan dalam rangka pengembangan UMKM di Kab. Asahan





KPKNL Kisaran bersama dengan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) melakukan kegiatan pelaksanaan Pemasangan Plang terhadap Aset BLBI yang bertempat di 4 (empat) lokasi di daerah Kab. Asahan dan Kota Tanjung Balai



Kegiatan pemusnahan Barang Milik Negara eks. Barang Hasil Penindakan Kepabeanan dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP Tipe C



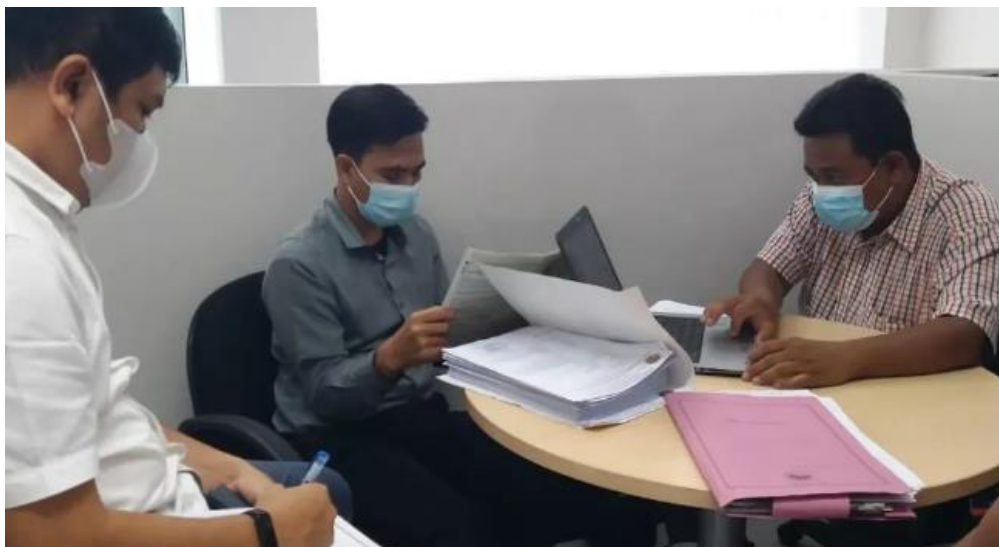
Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Pengukuran Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) pada Kantor Pertanahan Kota Tanjungbalai



Rapat Monitoring Sertifikasi BMN dalam rangka upaya dalam percepatan program sertifikasi BMN dan pencapaian target sertifikasi BMN KPKNL Kisaran Tahun 2022.



Koordinasi Bersama Perwakilan dari Ditjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian dalam rangka penyelesaian piutang negara



Kisaran melaksanakan Lelang Eksekusi HT BRI Cabang Kisaran, pelaksanaan Lelang tersebut laku dengan tiga objek terjual dengan besaran 117% dari harga limit.



KPKNL Kisaran dalam hal ini Seksi Piutang Negara melakukan Kegiatan Cek Fisik terhadap Barang Jaminan penyerahan Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara, DJKN.



Tim Penilai KPKNL Kisaran melakukan survei lapangan objek penilaian Barang Rampasan Negara pada Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Asahan



Kegiatan koordinasi progress Program Percepatan Sertifikasi BMN berupa Tanah tahun 2022 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu



KPKNL Kisaran melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara



Kegiatan Sosialisasi Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK) terhadap Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN pada Satuan Kerja di lingkup wilayah kerja KPKNL Kisaran



KPKNL Kisaran menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi Layanan KPKNL Kisaran terkait Pengelolaan BMN, Penilaian BMN, Lelang BMN, dan Pengurusan Piutang Negara



*Weekly Report (WR) KPKNL Kisan*



KPKNL Kisan menyelenggarakan Sosialisasi Service Excellent bersama Narasumber dari PT BRI Persero